

LAPORAN KINERJA TAHUN 2023



INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

Jalan Arif Rahman Hakim No. 1 Lumajang



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Arif Rahman Hakim No. 1 Telp. (0334) 881485 Fax. (0334) 894126
Email : Inspektorat.Lumajangkab.go.id
LUMAJANG – 67313

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas segala rahmat taufik dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2023 ini dapat berjalan lancar dan terselesaikan dengan baik, tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pada kesempatan ini, penyusun juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil selama proses penyusunan dan penyelesaian Laporan Kinerja ini.

Maksud disusunnya Laporan Kinerja (LKj) adalah menilai capaian kinerja tahunan penyelenggaraan pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang. Tujuan pelaporan kinerja untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang untuk meningkatkan kinerjanya.

Sesuai dengan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2018-2023, pada tahun 2023 pencapaian tujuan Inspektorat diukur dari satu sasaran strategis "Meningkatnya sistem pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance* dan meningkatnya efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan" dengan 1 (satu) indikator kinerja utama "Persentase Perangkat Daerah dengan indeks penerapan sistem pengendalian internal (SPI) minimal 3,5".

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dapat disimpulkan secara umum Inspektorat Daerah telah dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya selaku penyelenggara pengawasan Internal dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Lumajang. Namun demikian, penyusun menyadari bahwa dokumen ini masih terdapat celah untuk disempurnakan, karenanya saran dan kritik sangat diharapkan dari para pembaca sekalian.

Lumajang, 02 Februari 2024

INSPEKTOR DAERAH



MOHAMAD SUNARDI, MM
NIP. 196407011990031011



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM	1
1. Perangkat daerah	1
2. Sumber Daya Aparatur	6
3. Sumber Daya Sarana Prasarana	8
B. ISU STRATEGIS	9
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	10
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	15
A. CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH	15
1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023	19
2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Sebelumnya	22
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Renstra 2018-2023	25
4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standart Nasional	26
5. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan	27
6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	35
7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja	38
B. REALISASI ANGGARAN	56
BAB IV. PENUTUP	60
LAMPIRAN	62



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Tahun 2023	6
Tabel 2. Daftar Sarana dan Prasarana Inspektorat Daerah.....	8
Tabel 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Sebelum dan Sesudah Perubahan. 11	
Tabel 4. Anggaran Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Sebelum Perubahan	12
Tabel 5. Tujuan Indikator Sasaran dan Target Kinerja Tahun 2023.....	12
Tabel 6. Pagu Anggaran (Perubahan) Inspektorat Daerah Tahun 2023	13
Tabel 7. Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Tahun 2023.....	17
Tabel 8. Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2023.....	18
Tabel 9. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023.	19
Tabel 10. Perkembangan Target dan Realisasi Kinerja Tiap Tahun.....	22
Tabel 11. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Restra 2018-2023	25
Tabel 12. Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Target Nasional...	26
Tabel 13. Capaian Tindak Lanjut Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa..	29
Tabel 14. Alokasi Per Sasaran Inspektorat Daerah Tahun 2023.....	36
Tabel 15. Perbandingan Pencapaian Kinerja Tahun 2023.....	37
Tabel 16. Jenis dan Obyek Pemeriksaan Inspektorat Daerah Tahun 2023... 39	
Tabel 17. Perbandingan Layanan ISC Tahun 2022 dan Tahun 2023.....	52
Tabel 18. Penanganan Kasus Tahun 2023 dan Periode Sebelumnya.....	53
Tabel 19. Realisasi Anggaran Inspektorat Daerah Tahun 2023.....	56
Tabel 20. Hambatan/Tantangan dan Langkah Strategis Tahun 2023.....	60



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang	2
Gambar 2. Pohon Kinerja Inspektorat Daerah	3
Gambar 3. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja	24
Gambar 4. Proporsi Kegiatan Pengawasan Tahun 2023	38
Gambar 5. Penangan Kasus tahun 2023	53



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	63
Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Perubahan.....	65
Lampiran 3. Matrik Perubahan Renstra Tahun 2018-2023.....	67
Lampiran 4. Matrik Rencana Kerja Tahun 2023.....	73
Lampiran 5. Indeks Sistem Pengendalian Internal	79
Lampiran 6. Dokumentasi Kegiatan Inspektorat Daerah.....	81



BAB I. PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Perangkat daerah

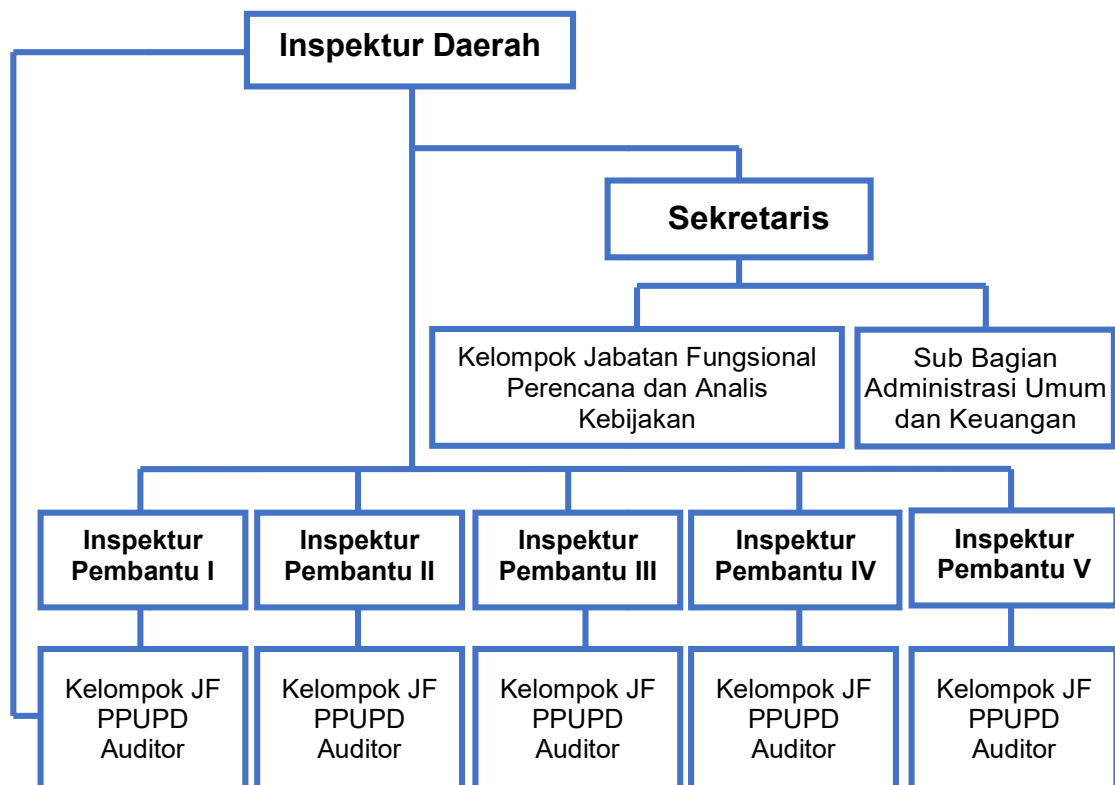
Pembentukan Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No. 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dan Susunan Perangkat Daerah dan dijelaskan dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 113 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.

Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah. Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Selain itu, Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja, keuangan dan kepatuhan melalui pemeriksaan, reviu, Evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas Penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam semangat perbaikan layanan publik melalui penyederhanaan birokrasi serta penyetaraan jabatan, telah diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2021 tentang SOTK

Inspektorat Daerah. Dalam peraturan tersebut telah disetarakan jabatan antara lain Kasubag Perencanaan menjadi fungsional perencana dan jabatan Kasubag Analisis dan Evaluasi menjadi fungsional analisis kebijakan. Adapun struktur organisasi Inspektorat Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2021 tentang SOTK Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang

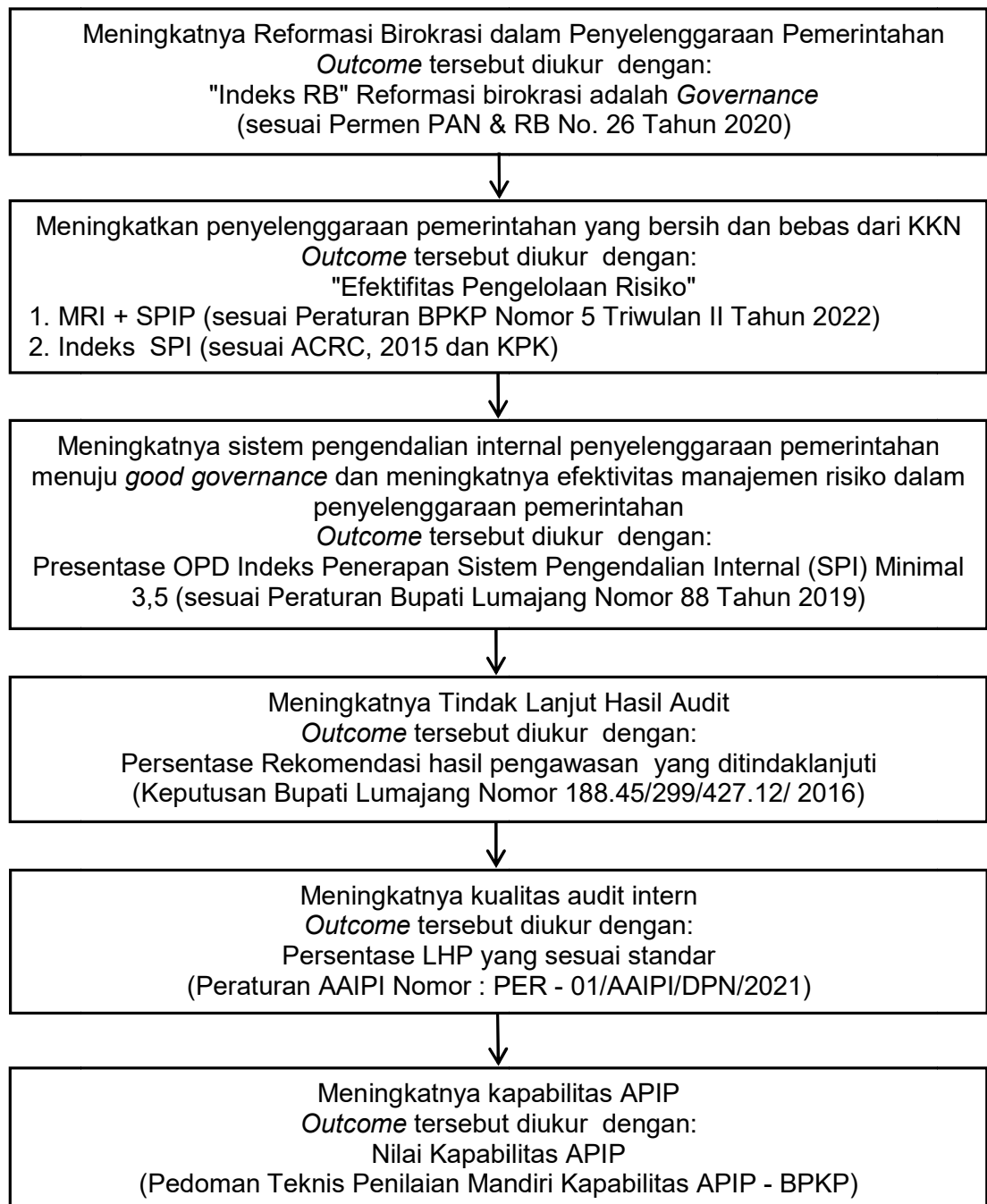
untuk meningkatkan keselarasan tujuan organisasi dengan kinerja setiap individu dan perencanaan strategi/program/kegiatan, perlu mengandalkan proses membangun model atau kerangka logis yang tepat. Pedoman ini memandu instansi pemerintah untuk mengembangkan model pemikiran logis yang tepat agar kinerja perusahaan diterjemahkan dengan baik menjadi kinerja individu dan untuk merancang strategi/program/kegiatan yang sesuai dengan tujuan.

Untuk mengawal struktur logika sebab –akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan *outcome* yang diinginkan maka diperlukan adanya pohon kinerja. Melalui pohon kinerja, instansi pemerintah diharapkan dapat mengenali alur



logika yang dapat memandu dalam menemukan strategi dan alternatif solusi dalam mencapai kinerja.

Fungsi pohon kinerja adalah menemukan alternatif solusi atau pemecahan masalah yang dibutuhkan oleh organisasi. Agar mendapatkan alternatif pemecahan masalah yang tepat tentu penyusunan pohon kinerja harus didasari pada kondisi faktual di lapangan dan berdasar pada *evidence* dan informasi yang andal. Pohon kinerja Inspektorat Daerah ditunjukkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Pohon Kinerja Inspektorat Daerah



Inspektorat Daerah telah menyusun pohon kinerja yang sesuai dengan *outcome* pemerintah Kabupaten Lumajang dan diturunkan hingga *level* operasional dengan prinsip logis, empiris dan holistik. Pohon kinerja Inspektorat Daerah didasarkan pada teori GRC (*Governance Risk Management and Control*) dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta permasalahan-permasalahan aktual yang sedang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang dan Inspektorat Daerah pada khususnya.

Konsep pohon kinerja Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut :

a. *Governance* (Tata Kelola)

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan nasional. Kualitas tata kelola pemerintahan akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program pembangunan nasional. Semakin baik tata kelola pemerintahan suatu negara, semakin cepat pula perputaran roda pembangunan nasional.

Pemerintah menerapkan reformasi birokrasi sebagai upaya/langkah strategis dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan sehingga lebih adaptif dan bebas korupsi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hasil yang diharapkan dari Reformasi Birokrasi adalah terciptanya pemerintahan bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN). Outcome tersebut diukur dengan Indeks Reformasi Birokrasi sesuai dengan Permen PAN-RB Nomor 26 tahun 2020.

b. *Risk Management* (Manajemen Risiko)

BPKP telah mengeluarkan Perka BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dimana dalam penilaian tersebut telah dilakukan integrasi



penilaian antara SPIP, MRI (Manajemen Risiko Indeks), IEPK (Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi) dan Kapabilitas APIP. Outcome tersebut diukur dengan Efektifitas Pengendalian Risiko dengan indikator nilai SPIP dan MRI tingkat kabupaten.

KPK telah melaksanakan Survei Penilaian Integritas sebagai salah satu perangkat diagnostik yang dapat membantu memetakan capaian upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Pada dasarnya pemerintah daerah diminta untuk melakukan upaya pemberantasan korupsi melalui perbaikan integritas. Semakin tinggi angka indeks menunjukkan tingkat integritas pemerintah kabupaten semakin baik. Outcome tersebut diukur dengan Indeks SPI (Survei Penilaian Integritas).

c. *Control/Compliance* (pengendalian/kepatuhan)

Pemerintah Kabupaten Lumajang telah menerbitkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 88 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 14 tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang. Perubahan dilakukan sebagai upaya penyesuaian terhadap perkembangan khususnya terkait penyelenggaraan manajemen Risiko dan penilaian maturitas sistem pengendalian pemerintah. Outcome tersebut diukur dengan Presentase OPD Indeks Penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Minimal 3,5.

d. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

Outcome dari pelaksanaan pemeriksaan atau pengawasan adalah terbitnya laporan hasil pengawasan/pemeriksaan. Perangkat daerah wajib melakukan tindak lanjut atas temuan sebagai perbaikan internal yang selaras dengan *risk register* yang telah disusun dalam upaya penerapan sistem pengendalian internal di perangkat daerah tersebut. *Outcome* tersebut diukur dengan Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti dengan berpedoman pada Keputusan Bupati Lumajang Nomor :188.45/299/427.12 /2016.

e. Kualitas Audit Intern

Kualitas profesi audit internal dituntut bagi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam mengembang tugas sebagai pemberi jasa *assurance* dan jasa *consulting*. Pemenuhan kualitas dicapai ketika APIP memenuhi secara penuh standar audit yang telah ditetapkan. Program jaminan kualitas dan peningkatan merupakan salah satu faktor penting dalam pemenuhan standar audit. *Output* dari pemeriksaan/pengawasan adalah laporan hasil pemeriksaan/pengawasan yaitu dokumen yang memuat informasi tentang temuan dan rekomendasi menurut kriteria/standar tertentu. *Outcome* tersebut diukur dengan Persentase LHP yang memenuhi standar.

f. Kapabilitas APIP

Upaya reformasi birokrasi dalam bidang pengawasan untuk mewujudkan peran APIP yang efektif termaktub dalam dalam pasal 11 PP Nomor 60 Tahun 2008. Kapabilitas APIP yaitu kemampuan untuk melaksanakan tugas – tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. Efektifitas peran APIP tersebut menuntut APIP memiliki kapabilitas yang memadai. *Outcome* tersebut diukur dengan Nilai Kapabilitas APIP atas *assessment* dari BPKP.

2. Sumber Daya Aparatur

Perkembangan Jumlah dan komposisi Pegawai pada Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1. Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Tahun 2023

Klasifikasi		Jumlah Total	Laki-Laki	Perempuan
A	Status Kepegawaian			
	- ASN	: 35	18	17
	- Tenaga kontrak	: 6	5	1
Jumlah Pegawai		: 41	23	18



Klasifikasi		Jumlah Total	Laki-Laki	Perempuan
B	Pendidikan ASN			
	- Magister (S2)	: 6	4	2
	- Sarjana (S1)	: 20	10	10
	- Sarjana Muda/Diploma III (D3)	: 4	2	2
	- Sarjana Muda/Diploma II (D2)	: -	-	-
	- Sarjana Muda/Diploma I (D1)	: -	-	-
	- SLTA	: 5	2	3
	- SLTP	: -	-	-
	- SD	: -	-	-
	Jumlah	: 35	18	17
C	Pendidikan tenaga kontrak			
	- Sarjana (S1)	: 2	1	1
	- SLTA	: 4	4	-
	Jumlah	: 6	5	1
D	Pangkat dan Golongan			
	- Pembina Utama Madya (IV/d)	: -	-	-
	- Pembina Utama Muda (IV/c)	: 2	1	1
	- Pembina Tingkat I (IV/b)	: 6	3	3
	- Pembina (IV/a)	: 3	2	1
	- Penata Tingkat I (III/d)	: 9	5	4
	- Penata (III/c)	: 2	1	1
	- Penata Muda Tingkat I (III/b)	: 5	1	4
	- Penata Muda (III/a)	: 1	1	-
	- Pengatur Tingkat I (II/d)	: 3	1	2
	- Pengatur (II/c)	: 4	3	1
	- Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	: -	-	-
	- Pengatur Muda (II/a)	: -	-	-
	- Juru Tingkat I (I/d)	: -	-	-
	- Juru (I/c)	: -	-	-
	- Juru Muda Tingkat I (I/b)	: -	-	-
	- Juru Muda (I/a)	: -	-	-
	Jumlah	: 35	18	17
E	Pejabat Struktural			
	- Eselon II	: 1	1	-
	- Eselon III	: 6	2	4
	- Eselon IV	: 1	-	1
	Jumlah	: 8	3	5
F	Pejabat Fungsional			
	- Fungsional Auditor	: 9	3	6
	- Fungsional P2UPD	: 5	4	1
	- Fungsional Perencana	: 1	1	-
	- Fungsional Analisis Kebijakan	: 1	1	-
	Jumlah	: 16	9	7
G	Pelaksana	: 11	6	5
	Jumlah	: 11	6	5

Sumber : Inspektorat Daerah Tahun 2023 (Data diolah)



3. Sumber Daya Sarana Prasarana

Sumber Daya Sarana dan Prasarana Inspektorat Daerah dapat dilihat dalam table sebagai berikut:

Tabel 2. Daftar Sarana dan Prasarana Inspektorat Daerah

Kode Bidang	Nama Bidang Barang	Keadaan Akhir per 31 Desember 2023		
		Jumlah Barang	Satuan	Nilai (Rp.)
1	2	3	4	5
1.3.1	GOLONGAN TANAH	1	Buah	156.264.000
1.3.1.01	- Tanah	1	Buah	156.264.000
1.3.2	GOLONGAN PERALATAN DAN MESIN	443	Buah / Set	3.553.338.952
1.3.2.01	- Alat - Alat Besar	2	Buah / Set	6.900.000
1.3.2.02	- Alat - Alat Angkutan	33	Buah / Set	1.545.681.764
1.3.2.03	- Alat - Alat Bengkel dan Alat Ukur	27	Buah	377.413.000
1.3.2.05	- Alat - Alat Kantor dan Rumah Tangga	284	Buah	986.579.638
1.3.2.06	- Alat - Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	15	Buah	114.744.750
1.3.2.10	- Komputer	82	Buah	522.019.800
1.3.3	GOLONGAN GEDUNG DAN BANGUNAN	3	Buah	2.518.665.721
1.3.3.01	- Bangunan Gedung	3	Buah	2.518.665.721
1.3.5	GOLONGAN ASET TETAP LAINNYA	165	Buah / Set	11.898.200
1.3.5.01	- Buku dan Perpustakaan	165	Buah / Set	11.898.200
JUMLAH		612		6.240.166.873



B. ISU STRATEGIS

Sepanjang tahun 2023, upaya pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah selalu dihadapkan pada permasalahan-permasalahan utama (*Strategic issues*), diantaranya adalah:

1. Permasalahan utama dalam pencapaian IKU Efektivitas pengelolaan risiko tingkat kabupaten:
 - a. Pemerintah daerah belum optimal dalam memitigasi risiko atas pencapaian tujuan dan sasaran
 - b. Pemerintah daerah belum optimal dalam melakukan identifikasi dan pengendalian atas risiko.
 - c. Tindak lanjut atas hasil pengawasan oleh perangkat daerah belum optimal (pengawasan yang dilakukan APIP merupakan identifikasi risiko dan *exposure* yang harus dimitigasi oleh perangkat daerah)
 - d. Pengawasan internal pada perangkat daerah belum terdokumentasi dengan baik (pemenuhan dokumen SPIP/MR dianggap sebagai tambahan tugas)
2. Permasalahan utama dalam pencapaian IKU Indeks SPI (Survei Penilaian Integritas):
 - a. Belum optimalnya upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di perangkat daerah
 - b. Risiko korupsi belum menjadi perhatian serius oleh perangkat daerah
 - c. Perangkat Daerah belum melakukan identifikasi risiko korupsi berdasarkan hasil SPI dan belum menyusun Rencana Tindak Pengendalian atas risiko tersebut
 - d. Data responden eksternal belum memadai

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Visi Kabupaten Lumajang adalah “Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat”. Untuk mewujudkan Visi tersebut, dirumuskan Misi prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun ke depan agar tujuan pembangunan dapat tercapai. Secara garis besar Misi Prioritas Pembangunan Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan perekonomian daerah yang berkelanjutan berbasis pada pertanian, usaha mikro dan pariwisata;
2. Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri;
3. Reformasi yang efektif, professional, akuntabel dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar dan bersih (*good and clean governace*) yang berbasis teknologi Informasi.

Berkaitan dengan misi yang ketiga, peran Inspektorat Daerah selaku perangkat daerah yang melakukan pengawasan akan menindaklanjuti dan mengimplemtasikan visi dan misi tersebut. Tujuan Pemerintah Kabupaten Lumajang merujuk pada RPJMD adalah “Meningkatkan Reformasi Birokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan” dengan indikator tujuan “Indeks Reformasi Birokrasi”.

Tujuan yang telah ditetapkan Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang selaras dengan sasaran RPJMD yaitu “Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN” dengan indikator tujuan adalah Efektivitas Pengelolaan Risiko Tingkat Kabupaten dan Indeks SPI (Survei Penilaian Integritas). Sasaran strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang adalah meningkatnya sistem pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance* dan meningkatnya efektivitas manajemen Risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2023 maka Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 dengan indikator sasaran dan target sesuai dengan yang telah tertuang dalam matriks Renstra dan Renja. Setiap sasaran telah dirumuskan dalam indikator dan target kinerja yang spesifik dan terukur. Target pencapaian tahunan



merupakan bagian integral dari target yang lebih strategis yaitu pencapaian target jangka menengah lima tahunan.

Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja.

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*).

Memasuki Triwulan IV Tahun 2023 Inspektorat Daerah melakukan perubahan Perjanjian Kinerja dikarenakan adanya perubahan jumlah anggaran. Adapun sasaran yang diharapkan bisa di raih pada akhir periode anggaran masih sama dengan Perjanjian Kinerja awal. Adapun sasaran strategis dan Program/Anggaran yang termuat dalam Perjanjian Kinerja sebelum perubahan tertuang dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Sebelum dan Sesudah Perubahan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya sistem pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan menuju <i>good governance</i> dan meningkatnya efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan	Persentase Perangkat Daerah Dengan Indeks Penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Minimal 3,5	75%



	pemerintahan		
--	--------------	--	--

Target Kinerja Inspektorat Daerah sebelum dan sesudah perubahan tidak mengalami perubahan, yaitu Meningkatnya sistem pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance* dan meningkatnya efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan indikator kinerja “Persentase Perangkat Daerah Dengan Indeks Penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Minimal 3,5”. Namun demikian, anggaran yang diperjanjikan mengalami perubahan dari Rp.6.035.473.705 menjadi Rp.6.591.893.008.

Tabel 4. Anggaran Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Sebelum Perubahan

No	Program	Anggaran		Keterangan
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	331.770.000	507.545.000	DAU
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	287.301.000	455.434.000	DAU
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.416.402.705	5.628.914.008	DAU
	Total	6.035.473.705	6.591.893.008	

Tabel 5. Tujuan Indikator Sasaran dan Target Kinerja Tahun 2023

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target
Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN		Efektivitas pengelolaan risiko tingkat kabupaten	OPD	3
		Indeks SPI (Survei Penilaian Integritas)	angka	82,5
	Meningkatnya sistem pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan menuju <i>good governance</i> dan meningkatnya efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Perangkat Daerah dengan indeks penerapan Sistem pengendalian Internal (SPI) minimal 3,5	%	75

Sumber: Inspektorat Daerah Tahun 2023



Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, maka perlu sumberdaya berupa anggaran sebagai modal untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun. Berikut adalah *nomenklatur* program dan pagu anggaran sesuai dengan perjanjian kinerja antara Inspektur Daerah dengan Bupati Lumajang.

Tabel 6. Pagu Anggaran (Perubahan) Inspektorat Daerah Tahun 2023

PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN (Rp.)
<i>A. Program/Kegiatan Teknis</i>		
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	455.434.000
1.a	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	334.320.000
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	83.231.000
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	113.841.000
	Reviu Laporan Kinerja	14.994.000
	Reviu Laporan Keuangan	24.969.000
	Pengawasan Desa	19.500.000
	Kerjasama Pengawasan Internal	49.867.000
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	27.918.000
1.b	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	121.114.000
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	12.690.000
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	108.424.000
2	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	507.545.500
2.a	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	61.740.000
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	43.772.000
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	17.968.000
2.b	Pendampingan dan Asistensi	445.805.000
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	5.860.000
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	31,839,000
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	388,172,000
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	19.934.000
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.536.192.257
3.a	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.958.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.999.000



	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.999.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.980.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.980.000
3.b	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.280.570.000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.269.106.865
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	40.260.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.866.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	2.866.000
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.866.000
3.c	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	268.700.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	268.700.000
3.d	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	337.641.037
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.985.676
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	83.010.019
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.980.342
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	238.665.000
3.e	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	38.553.630
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.553.630
3.f	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	341.907.750
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	900.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	168.135.750
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	172.872.000
3.g	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	248.020.759
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	154.360.605
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46.660.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	47.000.000
JUMLAH		6.591.883.008

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2023 (Data diolah)

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran akuntabilitas Kinerja dalam Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang didasarkan pada: 1) rangkaian sistem perencanaan (*Planning*) yang terdiri dari Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Rencana Kerja) dan Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang; 2) Fungsi *organizing* seluruh sumber daya dalam koridor prosedur yang telah ditetapkan yang kemudian menjadi dasar melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana aksi pengawasan dan pembinaan sebagai fungsi *actuating* dari perencanaan yang sudah dibuat; 3) Di akhir kegiatan terdapat fungsi *evaluating*, dimana semua pelaksanaan program dan kegiatan harus disampaikan ke dalam sebuah bentuk pertanggungjawaban penggunaan seluruh sumber daya manajemen pendukung dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan harus diukur sesuai kriteria dan indikatornya. Hal ini dimaksudkan agar arah kinerja pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah sudah berkesesuaian dengan tujuan-tujuan yang tertuang dalam dokumen perencanaan yang telah ditetapkan.

A. CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan indikator yang telah ditetapkan dengan capaian yang telah diraih. Indikator-indikator yang tertuang dalam dokumen perencanaan seperti Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja menjadi acuan dalam menilai capaian kinerja Inspektorat baik triwulan maupun tahunan. Langkah Pembandingan ini akan menunjukkan selisih kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mendapatkan strategi yang tepat dalam peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*). Pengukuran kinerja disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing, sehingga kegiatan – kegiatan tersebut dapat diukur pencapaiannya yang mendukung pada pencapaian indikator program. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :



- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, maka digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- Jika ukurannya sebaliknya, yaitu apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk melaksanakan penilaian capaian kinerja telah ditetapkan penilaian *skala ordinal* sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut:

85 ke atas	:	Sangat Baik
$70 \leq x < 85$:	Baik
$55 \leq x < 70$:	Cukup Baik
$x < 55$:	Kurang Baik

Secara umum Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang telah melaksanakan seluruh kegiatan yang direncanakan dalam rangka mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang 2018-2023. Pencapaian kinerja Tahun 2023 sudah mengacu dan sesuai dengan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023.

Keberhasilan atau kegagalan dari suatu sasaran bisa saja terjadi dalam proses waktu yang tidak singkat, lebih dapat dipastikan lagi faktor yang mempengaruhinya tidak dapat terjawab dalam waktu pengukuran akuntabilitas kinerja satu tahun. Evaluasi bisa berupa perbandingan antar

target, atau antar capaian dalam rentang sekian tahun, ataupun antara capaian dengan target sampai dengan akhir Tahun 2023. Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja Tahun 2023 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang terdiri dari 1 (satu) indikator sasaran.

Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2023 disajikan pada Tabel 7, Sedangkan Capaian Program/kegiatan berdasarkan target dan realisasi anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 7. Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Tahun 2023

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN		Efektifitas Pengelolaan Risiko Tingkat Kabupaten	OPD	3	3,16	105,33
		Indeks SPI (survey Penilaian Integritas)	Angka	82,5	75,9	92%
	Meningkatnya sistem pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan menuju <i>good governance</i> dan meningkatnya efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Perangkat Daerah dengan indeks penerapan sistem pengendalian internal (SPI) minimal 3,5	%	75	95,91	127,88



Tabel 8. Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Pembilang	Penyebut	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian (%)	Kategori
Meningkatnya sistem pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan menuju <i>good governance</i> dan meningkatnya efektivitas manajemen Risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Perangkat Daerah Dengan Indeks Penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Minimal 3,5.	47	49	75	95,91	127,88	Sangat Baik

Capaian Kinerja Inspektorat Daerah diukur dari Perjanjian Kinerja Inspektur Daerah Kabupaten Lumajang dengan Bupati Lumajang dengan Indikator Kinerja yang berbunyi “Persentase Perangkat Daerah Dengan Indeks Penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Minimal 3,5.” Indikator Kinerja ini lebih menggambarkan sebuah potret penerapan Sistem Pengendalian Intern yang capaiannya bersifat fluktuatif. Merunut pada dokumen *Action Plan* Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2023, target capaian indikator kinerja Inspektorat Daerah tahun 2023 sebesar 75%. Pada akhir periode tahun anggaran tahun 2023, diketahui bahwa realisasi tahun 2023 mencapai 95,91%, jauh melebihi angka yang ditargetkat. Dengan demikian maka capaian kinerja Inspektorat Daerah tahun 2023 mencapai 127,88%. Capaian ini termasuk dalam kategori Sangat Baik.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Perbandingan antara Target dengan Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2023 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 9. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023.

Tujuan	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja		
Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dari KKN			Efektivitas Pengelolaan Risiko	3	3,16	105,33%		
			Indeks SPI (Survei Penilaian Integritas)	82,5	75,9	92%		
	Meningkatnya sistem pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan menuju <i>good governance</i> dan meningkatnya efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan			Persentase Perangkat Daerah dengan indeks penerapan sistem pengendalian internal (SPI) minimal 3,5	75%	95,91%	127,88%	
				Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	90%	89.20%	99,17
				Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan lainnya (pembinaan) yang ditindaklanjuti	78%	82.48%	105,74
				Persentase LHP yang sesuai standar	100%	100%	100%	
				Nilai Kapabilitas APIP	3.00	3.00	100%	



Pencapaian tujuan Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dari KKN diukur berdasarkan dua indikator kinerja yaitu:

1. **Efektivitas Pengelolaan Risiko.**

Indikator kinerja ini pada tahun 2023 tercapai 105,33% yang diperoleh dari hasil formulasi:

$$\text{Efektivitas Pengelolaan Risiko: } \frac{\text{Nilai Maturitas SPIP+ Nilai MRI Kabupaten}}{2}$$

Adapun unsur penunjang ketercapaian indikator kinerja ini adalah adanya integrasi dalam proses evaluasi SPIP, MR dengan FRC. Selain itu Inspektorat daerah jugamelakukan monitoring secara berkala untuk mendapatkan *feedback* dalam pelaksanaan pengawasan

2. **Indeks SPI (Survei Penilaian Integritas).**

Indikator ini diperoleh berdasarkan hasil survei Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI). Berdasarkan hasil rapat webinar melalui zoom meeting diperoleh Indeks SPI Kabupaten Lumajang sebesar 75,9. Meskipun masih dibawah target capaian, indeks ini masih berada diatas rerata capain tingkat nasional pada tahun 2023 yang berada pada angka 70,9. Adapun faktor yang mempengaruhi capaian yang kurang dari target antara lain: 1). Belum optimalnya upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di perangkat daerah; 2). Risiko korupsi belum menjadi perhatian serius oleh perangkat daerah; 3). Perangkat Daerah belum melakukan identifikasi risiko korupsi berdasarkan hasil SPI dan belum menyusun Rencana Tindak Pengendalian atas risiko tersebut; dan 4). Data responden eksternal belum memadai.

Upaya pencapaian sasaran strategis “**meningkatnya sistem pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance* dan meningkatnya efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan**” diukur dengan indikator kinerja berupa “Persentase Perangkat Daerah dengan indeks penerapan sistem pengendalian internal (SPI) minimal 3,5”. Capaian sasaran strategis sebesar 127,88 diperoleh dari hasil formulasi: Jumlah perangkat daerah dengan indeks penerapan SPI minimal 3,5 / jumlah seluruh perangkat daerah x 100%. Sebanyak 47 dari 49 OPD telah memenuhi kriteria dalam pencapaian indikator kinerja ini.



Dalam rangka mencapai saran strategis, maka Inspektorat Daerah menentukan dua program utama yang akan berdampak kepada pencapaian tujuan. Adapun program pertama yaitu **Program Penyelenggaraan Pengawasan**. Untuk mengukur capaian kinerjanya diukur dengan indikator kinerja Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti. Berdasarkan hasil perhitungan dengan formulasi Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang Ditindak Lanjuti / Jumlah seluruh rekomendasi hasil pengawasan x 100%, diperoleh hasil 89.20% atau mencapai 99,17%.

Sedangkan pada program kedua yaitu Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi, diukur dengan menggunakan tiga indikator kinerja yaitu: 1) Persentase Rekomendasi hasil pengawasan lainnya (pembinaan) yang ditindak lanjuti; 2) Persentase LHP yang sesuai standar dan 3) Nilai Kapabilitas APIP. Indikator kinerja pertama diukur dengan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan lainnya yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah seluruh rekomendasi hasil pengawasan lainnya}} \times 100\%$$

Adapun hasil dari perhitungan tersebut adalah 100%. Adanya Melaksanakan kegiatan reuiu, evaluasi dll sesuai dengan time schedule yang telah direncanakan menjadi salah satu kunci pencapaian indikator program ini.

Pencapaian indikator program kedua dipengaruhi oleh *Quality Assurance (QA)* oleh Tim QA atas seluruh LHP yang disusun dan dilakukan telaah LHP antar Irban. Capaian indikator kinerja ini dihitung dengan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah LHP yang sesuai standar}}{\text{Jumlah LHP yang diterbitkan}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas didapatkan realisasi sebesar 82,48% dari target yang ditentukan sebesar 78%, atau tercapai lebih dari 100%.

Pencapaian indikator program ketiga dipengaruhi oleh Pemenuhan LK Penilaian Kapabilitas APIP tepat waktu dan disertai dengan dokumen pendukung yang memadai. Adapun nilai kapabilitas AKIP yang diraih adalah “3” atau tercapai 100% dari indikator yang ditetapkan. Nilai ini merupakan hasil penilaian dari BPKP



2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan antara Target dengan Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2023 dengan target dan capain tahun sebelumnya disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 10. Perkembangan Target dan Realisasi Kinerja Tiap Tahun

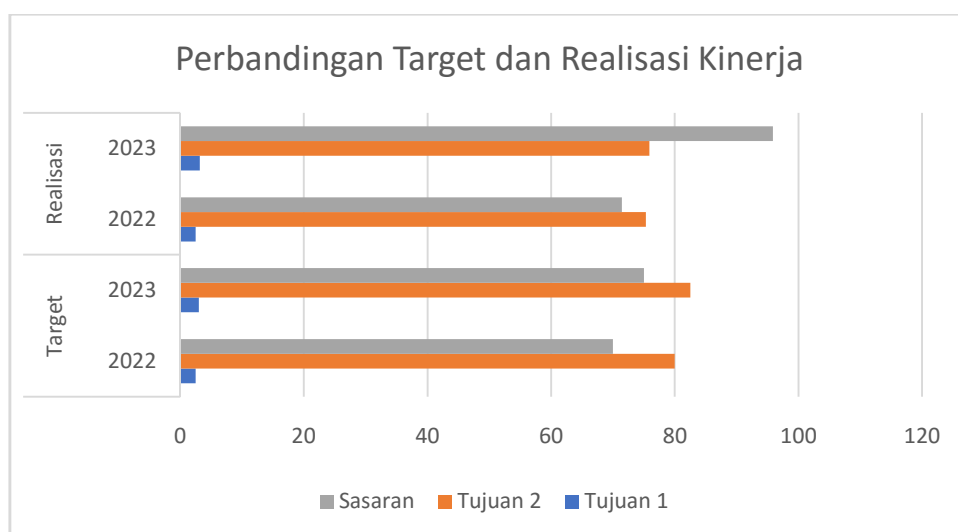
Tujuan	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target Kinerja						Realisasi Kinerja					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dari KKN		Efektivitas Pengelolaan Risiko	N/A	N/A	N/A	N/A	2,5	3	N/A	N/A	N/A	N/A	2,5	3,16
		Indeks SPI (Survei Penilaian Integritas)	N/A	N/A	N/A	N/A	80	82,5	N/A	N/A	N/A	N/A	75,31	75,9
	Meningkatnya sistem pengendalian internal penyelenggara-ran pemerintahan menuju <i>good governancedan</i> meningkatnya efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Perangkat Daerah dengan indeks penerapan sistem pengendalian internal (SPI) minimal 3,5	N/A	N/A	N/A	N/A	70	75	N/A	N/A	N/A	N/A	71,42	95,9

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang 2023 (Data diolah)

Inspektorat Daerah melakukan perubahan Renstra pada tahun 2022, yang disebabkan adanya perubahan tujuan dan sasaran strategis beserta indikator kerjanya. Dampak dari Langkah ini adalah, pengukuran capaian kinerja hanya dapat dilakukan pada tahun 2022-2023 sebagaimana tercantum dalam table di atas.

Capaian Kinerja Inspektorat Daerah diukur dari Perjanjian Kinerja Inspektur Daerah Kabupaten Lumajang dengan Bupati Lumajang, dimanaperjanjian kinerja tersebut diukur dengan Indikator Kinerja yang berbunyi “Persentase Perangkat Daerah Dengan Indeks Penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Minimal 3,5”. Target capaian indikator kinerja pada akhir tahun 2023 sebesar 75%. Pada akhir periode tahun anggaran tahun 2023, diketahui bahwa realisasi tahun 2023 mencapai 95,91%, jauh melebihi angka yang ditargetkan. Dengan demikian maka capaian kinerja Inspektorat Daerah tahun 2023 mencapai 127,88%.

Adapun perbandingan realisasi kinerja Inspektorat Daerah dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Dalam grafik tersebut terlihat bahwa penetapan target kinerja tujuan dan sasaran selalu naik tiap tahunnya. Hal ini juga selaras dengan meningkatnya nilai capaian pada tiap indikator kinerja, terlebih pada sasaran yang mencapai 127,88. Meskipun terdapat satu indikator tujuan yang tidak mencapai target yaitu Indeks SPI (Survei Penilaian Integritas), namun bukan berarti capaian ini tergolong gagal, karena semenjak tahun 2021 tren capaian SPI tingkat nasional memang sedang menurun. Bahkan Nilai SPI Kabupaten Lumajang tahun 2023 masih jauh di atas rerata realisasi nasional yang berada pada kisaran 70,9.



Gambar 3. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Renstra 2018-2023

Berikut adalah perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan target renstra 2018-2023.

Tabel 11. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Restra 2018-2023

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Renstra 2018-2023
Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dari KKN		Efektivitas Pengelolaan Risiko	3	3,16	3
		Indeks SPI (Survei Penilaian Integritas)	82,5	75,9	82,5
	Meningkatnya sistem pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan menuju <i>good governance</i> dan meningkatnya efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Perangkat Daerah dengan indeks penerapan sistem pengendalian internal (SPI) minimal 3,5	75%	95,91%	75%

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang 2023 (Data diolah)

Realisasi indikator Efektivitas Pengelolaan Risiko telah melebihi target renstra 2) Indeks SPI (Survei Penilaian Integritas), belum mampu menyamai target, namun demikian capaian ini masih lebih seiring dengan tren capaian di level nasional, dimana sejak tahun 2021 selalu mengalami penurunan. Sedangkan indikator kinerja Sasaran strategis mampu meraih capaian yang jauh melampaui target renstra, yaitu mencapai 127,88%.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standart Nasional

Capaian kinerja Inspektorat Daerah tahun 2023 dibandingkan dengan target nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 12. Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Target Nasional

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Nasional
Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dari KKN		Efektivitas Pengelolaan Risiko	3	3,16	105,33%	N/A
		Indeks SPI (Survei Penilaian Integritas)	82,5	75,9	92%	74
	Meningkatnya sistem pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan menuju <i>good governance</i> dan meningkatnya efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Perangkat Daerah dengan indeks penerapan sistem pengendalian internal (SPI) minimal 3,5	75%	95,91%	127,88%	N/A

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang 2022 (Data diolah)

Pencapaian tujuan dapat dinilai dari dua indikator kinerja yaitu: 1) Efektivitas Pengelolaan Risiko, yang tidak dapat dibandingkan karena tidak adanya indikator serupa di daerah lain maupun di tingkat nasional; 2) Indeks SPI (Survei Penilaian Integritas), dimana bila dibandingkan dengan target nasional maka capaian Inspektorat Daerah sebesar 102,57%. Bila dibandingkan dengan realisasi SPI tingkat nasional sebesar 70,9, maka realisasi Kabupaten Lumajang sebesar 75,91 atau mencapai 107,05%. Sedangkan indikator kinerja Sasaran strategis tidak dapat dibandingkan dengan target indikator kinerja tingkat nasional karena tidak adanya target tersebut dalam RPJMN. Demikian halnya tidak ditemukan indikator sasaran yang serupa pada daerah lain.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

a. Analisis Terhadap Capaian Tujuan

Tujuan Inspektorat Daerah adalah Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dari KKN. Tingkat keberhasilan tujuan ini diukur dengan dua indikator yaitu Efektivitas Pengelolaan Risiko dan Indeks SPI (Survei Penilaian Integritas). Keberhasilan pemenuhan indikator tujuan Efektivitas Pengelolaan Risiko yang mencapai 105,33% dipengaruhi oleh:

1) Nilai Pemenuhan Reformasi Birokrasi Unit

Dalam rangka mewujudkan birokrasi pemerintahan yang profesional, berintegritas, bersih serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, maka Pemerintah secara berkelanjutan terus melakukan upaya-upaya perbaikan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Untuk mengukur kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan instansi pemerintah (pemerintah daerah), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah menetapkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang digunakan sebagai instrumen penilaian Reformasi Birokrasi secara mandiri (*self-assessment*). Dalam rangka mempermudah, meningkatkan efektivitas dan efisiensi implementasi PMPRB maka penilaian tersebut dilakukan secara *online* dan Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang melaksanakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dimaksud.

Dalam pelaksanaannya, Nilai PMPRB Pusat dan Unit telah terintegrasi, dimana Inspektorat Daerah selaku Tim Penilai Intern sudah membangun sistem pengawasan online www.simaud.inspektorat.lumajangkab.go.id yang dapat diakses untuk pemenuhan penilaian oleh seluruh perangkat daerah/unit di Kabupaten Lumajang. Namun demikian, dengan adanya wacana penerapan Reformasi Birokrasi Tematik pada tahun 2023 oleh kementerian PAN/RB. Dimana fokus Reformasi Birokrasi bukan lagi hanya terkait pemenuhan data, tetapi lebih kepada penyelesaian permasalahan di sekelilingnya, yang meliputi tema Penghentasan

Kemiskinan, Peningkatan Investasi, Digitalisasi Layanan Pemerintah, serta Mendukung Program Presiden.

2) Nilai Pemenuhan Tindak Lanjut

Pemenuhan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK Tahun 2023 didasarkan pada hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK semester I tahun 2023, dimana persentase tindak lanjut entitas Pemerintah Kabupaten Lumajang telah tercapai 93,37% dari rekomendasi LHP BPK mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2023. Pada laporan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi BPK tersebut terdapat 490 temuan pemeriksaan dengan 1012 rekomendasi dan telah selesai ditindaklanjuti sebanyak sebanyak 945 rekomendasi. Berdasarkan laporan hasil perbandingan pemantauan penyelesaian tindak lanjut semester II tahun 2022 dengan laporan hasil pemantauan penyelesaian tindak lanjut semester I tahun 2023, dapat diketahui bahwa terdapat peningkatan status penyelesaian tindak lanjut sebanyak 22 rekomendasi.

Rekomendasi temuan berdasarkan nilai keuangan sejumlah Rp. 21.872.391.877,79.- dan telah terselesaikan sebesar Rp. 19.753.711.138,64, dan masih tersisa sebesar Rp 2.118.680.739,15 .- dengan rincian belum sesuai rekomendasi BPK sebesar Rp. 2.118.680.739,15.- dan belum ditindaklanjuti sebesar Rp. 0,- atau telah tercapai 90,31%. Dengan demikian, bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022 yang mencapai 80,94%, maka terhadap peningkatan persentase penyelesaian tindak lanjut temuan keuangan BPK telah meningkat 9,37 % pada akhir tahun 2023.

Bila dibandingkan dengan laporan hasil pemantauan sebelumnya pada laporan pemantauan penyelesaian tindak lanjut semester II tahun 2022, dapat diketahui bahwa berdasarkan pemantauan TLRHP semester II Tahun 2022 terdapat penambahan 11 temuan pemeriksaan dengan 20 rekomendasi. Nilai kerugian berdasarkan hasil pemeriksaan Semester I Tahun 2023 masih sama dengan hasil pemeriksaan semester II tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 21.872.391.877,79.

Pemantauan TLRHP sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 menunjukkan bahwa terdapat nilai yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi BPK mencapai Rp. 1.868.650.049,45. Tindak lanjut belum sesuai rekomendasi Rp. 274.940.661,97 dan belum ditindaklanjuti sebesar Rp. 1.593.709.387,48. Sehingga total nilai penyerahan asset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah mencapai Rp. 19.753.711.138,64 pada triwulan IV. Dengan demikian rekomendasi pengembalian aset atau penyetoran uang ke kas negara tersisa Rp. 2.118.680.739,15.

Selain upaya penyelesaian hasil temuan BPK, Inspektorat daerah juga melakukan upaya-upaya penyelesaian tindak lanjut terhadap pemeriksaan mandiri yang dilakukan terhadap perangkat daerah dan perangkat desa. Perhitungan capaian tindak lanjut dihitung berdasarkan data Tahun 2010 sampai dengan Bulan Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 13. Capaian Tindak Lanjut Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa

Capaian Tindak Lanjut	Perangkat Daerah	Pemerintah Desa
Temuan Pemeriksaan	7.310	7.426
Rekomendasi	15.509	22.110
Rekomendasi Selesai	12.965	19.123
Capaian TL	83.59 %	86.49 %

Sumber: Diolah Dari Data Inspektorat Daerah Tahun 2023

3) Nilai Pemenuhan *Fraud Risk Control*

FRC (*Fraud Risk Control*) merupakan sistem yang dibangun dengan referensi dari *Monitoring Control Prevention* KPK. Jenis-jenis FRC sendiri terdiri atas:

- a) FRC FRC Perangkat Daerah
- b) FRC Desa
- c) FRC Sekolah,
- d) FRC Unit (Pasar, Puskesmas)
- e) FRC Tematik (Peningkatan investasi, FRC peningkatan IPM, FRC penanggulangan kemiskinan dan digitalisasi administrasi).

Evaluasi FRC dilaksanakan secara berjenjang, dimana pertama dilaksanakan oleh Lini I, Lini II dan Inspektorat Daerah sebagai Lini III. Indikator FRC di tahun 2023 dijadikan sebagai salah satu indikator dalam indeks TPP. Hambatan dalam pelaksanaan FRC secara umum adalah pemahaman OPD dan

Pemerintah Desa yang belum optimal terhadap prosedur pemenuhan FRC. Berbagai upaya optimalisasi pemenuhan FRC telah dilakukan melalui kegiatan pembinaan dan asistensi oleh Inspektorat Daerah.

Dalam pencapaian indikator tujuan tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah, diantaranya:

1. Pemerintah daerah belum optimal dalam memitigasi risiko atas pencapaian tujuan dan sasaran
2. Pemerintah daerah belum optimal dalam melakukan identifikasi dan pengendalian atas risiko.
3. Tindak lanjut atas hasil pengawasan oleh perangkat daerah belum optimal (pengawasan yang dilakukan APIP merupakan identifikasi risiko dan exposure yang harus dimitigasi oleh perangkat daerah)
4. Pengawasan internal pada perangkat daerah belum terdokumentasi dengan baik (pemenuhan dokumen SPIP/MR dianggap sebagai tambahan tugas)

Untuk mengatasi permasalahan tersebut Inspektorat Daerah melakukan berbagai upaya diantaranya:

1. Melakukan evaluasi SPIP dan MR secara berkala
2. Melakukan bimtek terkait SPIP / MR
3. Melakukan pendampingan dan asistensi atas SPIP / MR
4. Melakukan pemeriksaan kinerja / ketaatan / dengan tujuan tertentu
5. Inspektorat Daerah telah melakukan identifikasi risiko kunci dan sudah dimandatkan ke dalam FRC dan dikendalikan secara nyata.
6. Koordinasi dengan bagian organisasi dan perangkat daerah terkait pemenuhan dan kualitas data responden eksternal

Pemenuhan terhadap Indikator Tujuan berupa Indeks SPI (Survei Penilaian Integritas) terealisasi sebesar 75,90 atau mencapai 92% dari target yang ditetapkan. Meskipun tidak mencapai nilai 100% dari target yang ditetapkan, capaian ini sudah melampaui capaian target tingkat nasional yang hanya berada pada angka 70,9. Selaian adanya tren penurunan nilai SPI tingkat nasional dalam tiga tahun terakhir, beberapa hal yang menjadi permasalahan utama dalam pencapaian indikator tujuan ini antara lain:

1. Belum optimalnya upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di perangkat daerah
2. Risiko korupsi belum menjadi perhatian serius oleh perangkat daerah
3. Perangkat Daerah belum melakukan identifikasi risiko korupsi berdasarkan hasil SPI dan belum menyusun Rencana Tindak Pengendalian atas risiko tersebut
4. Data responden eksternal belum memadai.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Inspektorat Daerah melakukan berbagai upaya diantaranya:

1. Melakukan monitoring atas pelaksanaan pengendalian risiko korupsi baik melalui FRC maupun langsung ke perangkat daerah
2. Memasukkan kewajiban identifikasi risiko dan penyusunan RTP pada FRC
3. Melakukan pendampingan dan asistensi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi
4. Melakukan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik
5. Melakukan survey internal SPI kepada responden internal (seluruh pegawai di lingkungan Pemkab)

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Inspektorat Daerah melampaui capaian target nilai SPI tingkat nasional antara lain:

1) Mengintegrasikan pengendalian RTL hasil SPI dengan FRC

Integrasi RTL hasil SPI dalam FRC memungkinkan Inspektorat daerah melakukan pemantauan dan pengendalian secara berkala terhadap unsur-unsur yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan SPI. Hal ini meningkatkan efektifitas kinerja secara signifikan mengingat keterbatasan jumlah personil di Inspektorat daerah dapat terbantu dengan keberadaan sistem online FRC.

2) Melaksanakan Dialog Pengawasan Melalui FOKAL

FOKAL adalah Forum Koordinasi dan Komukasi Pengawasan Lumajang yang diselenggarakan Aparat Pengawas Intern Pemerintah Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang selaku *third lined* dengan para pihak penyelenggara pengawasan untuk kualitas, efektivitas dan efisiensi pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang. Keberadaan FOKAL membuka ruang dialog para pihak dalam mewujudkan pengawasan yang efektif dan efisien. Membangun kesepahaman terkait pentingnya pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

3) Laboratorium Teknik dan Forensik.

Laboratorium ini adalah kebutuhan untuk menunjang audit forensik dan investigatif. Hal ini kebutuhan mendasar karena dalam proses pengungkapan kasus korupsi yang umumnya dilakukan secara tersembunyi. Hal ini membutuhkan sarana yang mampu memfasilitasi para pemeriksa untuk mengungkapnya. Laboratorium forensik menjadi penting tatkala dibutuhkan pengungkapan terhadap semisal dokumen palsu, pengesahan palsu dan sebagainya. Sedangkan Laboratorium teknis sangat berperan dalam mengungkap kecurangan/penyelewengan dalam penyelenggaraan kegiatan teknis. Sehingga keberadaan laboratorium teknis dan forensic berkontribusi dalam meningkatkan kualitas, efektivitas dan efisiensi pengawasan

4) Nilai Pemenuhan TGR

Pada Tahun 2023, tercatat empat nilai pemenuhan TGR yang harus diselesaikan. Hingga akhir tahun anggaran Tahun 2023 telah terselesaikan tiga kasus, sedangkan satu kasus masih dalam proses penyelesaian. Hambatan dalam pemenuhan TGR karena adanya keterlambatan pelunasan pada beberapa pihak yang dikenai TGR dengan berbagai alasan. Sehingga terdapat beberapa capaian pemenuhan TGR yang belum optimal. Namun demikian Inspektorat Daerah telah melakukan inovasi dengan telah adanya ruang sidang terintegrasi guna percepatan pemenuhan penyelesaian TGR.

5) Nilai pencapaian LHKSN

Berdasarkan data rekap per Juli 2023, tercatat 3.640 orang ASN, atau 66,88% dari total ASN 5.442 orang telah melaporkan kekayaan pada sistem SIHARKA. Hambatan yang muncul pada sistem pelaporan ini adalah: 1) banyak pelapor yang lupa/tidak menyimpan akses (*username* dan *password*) secara tertib dan mengakibatkan pelaporan belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, 2) Web LHKSN seringkali tidak dapat diakses.

6) Nilai Kepatuhan Pelaporan Gratifikasi

Sampai dengan akhir tahun 2023 terdapat lima laporan gratifikasi yang masuk kepada Inspektorat Daerah, dan 100% telah selesai ditindaklanjuti. Hambatan yang dihadapi dalam pemenuhan nilai kepatuhan pelaporan gratifikasi adalah belum seluruh pihak memahami atas ketentuan dan kewajiban pelaporan gratifikasi jika menerima/mendapatkan kondisi yang termasuk dalam gratifikasi.

b. Analisis Terhadap Capaian Sasaran Strategis

Sasaran strategis Inspektorat daerah yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja antara Inspektur Daerah dan Bupati Lumajang adalah Meningkatnya sistem pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance* dan meningkatnya efektivitas manajemen Risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dimana Keberhasilan pencapaiannya diukur dari indikator Persentase Perangkat Daerah Dengan Indeks Penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Minimal 3,5.

Capain sebesar 127,88% bukan berarti tidak menghadapi permasalahan dalam upaya pemenuhannya. Adapaun beberapa permasalahan utama yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja sasaran antara lain:

1. Kurang patuhnya Perangkat Daerah dalam melakukan pemenuhan SPIP/FRC, RB unit, tindak lanjut, dst.
2. Implementasi SAKIP di tingkat perangkat daerah kurang memadai.
3. Perangkat daerah belum optimal dan terbuka dalam memitigasi risiko atas pencapaian tujuan dan sasaran
4. Perangkat daerah belum optimal dalam melakukan identifikasi dan pengendalian atas risiko.
5. Implementasi SPIP dan MR hanya dilaksanakan oleh sebagian dari pegawai pada perangkat daerah

Adapaun upaya yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah dalam menyelesaikan permasalahan yaitu mengintegrasikan pemenuhan dan evaluasi atas komposit indeks yang ada melalui FRC. Langkah ini memudahkan dalam melakukan monitoring dan memberikan *feedback* secara langsung kepada perangkat daerah.

Tingginya realisasi dan capaian indoikator sasaran Inspektorat Daerah pada akhir tahun anggaran 2023 disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya:

1. Koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan perangkat daerah yang dilakukan secara langsung ataupun online. Pembagian wilayah kerja / perangkat daerah pada setiap lrbn, memungkinkan terjadinya interaksi yang terkonsentrasi dan berkesinambungan.

2. Optimalisasi penggunaan SDM pada Sekretariat yang kompeten untuk ikut membantu dalam pelaksanaan evaluasi atas komposit indeks yang ada. Keterbatasan SDM pada Inspektorat Daerah memang menjadi salah satu faktor penghambat pencapaian tujuan, sehingga distribusi dan optimalisasi peran pada sekretariat menjadi penting untuk pencapaian sasaran.
3. Pelaksanaan peran consulting oleh Inspektorat Daerah. Hal ini membuka ruang komunikasi yang efektif dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan OPD.
4. Pelaksanaan sosialisasi/bimtek atas komposit indeks yang ada. Terbangunnya pemahaman dan kesepahaman terhadap komposit indeks menjadi penting dalam rangka pencapaian indikator sasaran. Kesepahaman yang terbangun antar OPD maupun Inspektorat Daerah telah menunjang upaya kinerja yang memadai dalam pencapaian indikator sasaran.
5. Memasukkan pemenuhan FRC sebagai salah satu bentuk *reward* and *punishment* TPP. Kebijakan ini telah meningkatkan respon dan tanggungjawab OPD dalam pencapaian sasaran.
6. Melaksanakan *Risk Based Audit*(pengawasan berbasis risiko) yang dapat memberikan jaminan bahwa risiko yang ada sudah dikelola oleh objek pemeriksaan dengan baik, dan memiliki batasan risiko yang tidak berdampak terhadap sasaran OPD. *Risk Based Audits* sangat penting dijalankan karena dapat membantu terpenuhinya tanggung jawab OPD secara efektif.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, Inspektorat Daerah didukung dengan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan seluruh program kerja didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam DAU sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Akuntabilitas anggaran dihitung dari setiap sasaran yang didukung dengan berbagai program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 14. Alokasi Per Sasaran Inspektorat Daerah Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Anggaran		
		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
2	3	4	5	6
Meningkatnya sistem pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance dan Meningkatkan efektivitas manajemen Risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Perangkat Daerah Dengan Indeks Penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Minimal 3,5.	6.591.883.008	6.476.982.404,14	98,26

Sumber : Inspektorat Daerah (Data diolah tahun 2023)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi anggaran Inspektorat Daerah tahun 2023 mencapai Rp. 6.476.982.404,14 dari yang ditargetkan sebesar Rp. 6.591.883.008 atau mencapai 98,26 % dari target yang telah ditetapkan. Bila mengacu pada standar capaian anggaran, maka capaian ini tergolong sangat baik. Untuk mengetahui efisiensi penggunaan sumberdaya, maka dilakukan perhitungan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja dengan persamaan sebagai berikut:

Efisiensi : Capaian Kinerja – Capaian Anggaran



Tabel 15. Perbandingan Pencapaian Kinerja Tahun 2023

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	6	10
1	Meningkatnya sistem pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan menuju <i>good governance</i> dan Meningkatnya efektivitas manajemen Risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Perangkat Daerah Dengan Indeks Penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Minimal 3,5.	75%	95,91%	127,88	6.591.883.008	6.476.982.404,14	98,26	29,62

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang 2023 (Data diolah)

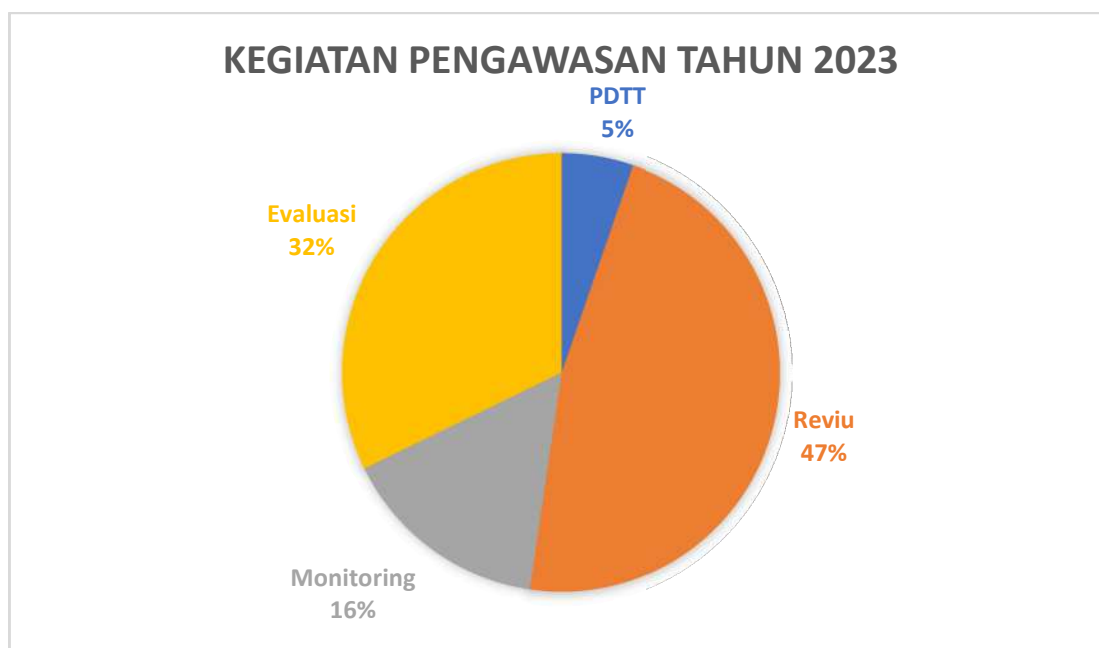
Capaian anggaran Inspektorat Daerah pada Tahun 2023 sebesar Rp. 6.591.883.008 dari alokasi yang dianggarkan sebesar Rp. 6.476.982.404,14, atau mencapai 98,26%. Perlu kami sampaikan bahwa anggaran Inspektorat Daerah telah mengalami perubahan dari Rp. 6.035.473.705 (berdasarkan dokumen *action Plan* Inspektorat daerah tahun 2023) menjadi Rp. 6.591.883.008 (berdasarkan dokumen *Action Plan*-Perubahan Inspektorat daerah tahun 2023). Berdasarkan persamaan yang telah tertuang dalam halaman 52, maka realisasi anggaran Inspektorat sebesar 29,62% masuk dalam kategori efisien

7. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Inspektorat Daerah sebagai lini ketiga pengawasan, pada tahun 2023 menjalankan dua program utama dan satu program penunjang yang telah dilaksanakan secara transparan, akuntabel serta berorientasi hasil. Program yang menunjang secara langsung adalah Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi. Nomenklatur pencapaian kinerja Inspektorat Daerah didasarkan pada hubungan kausalitas, dimana dua program utama dan satu program penunjang membentuk hubungan saling melengkapi untuk mencapai sasaran strategis yang berdampak pada keberhasilan pencapaian tujuan. Adapun penjelasan mengenai kegiatan/aktivitas yang masuk dalam lingkup Program Penyelenggaraan Pengawasan yaitu:

a. Pengawasan Internal dan Tujuan Tertentu

Inspektorat Daerah sebagai pengawas penyelenggaraan pemerintahan wajib melaksanakan pengawasan terhadap perangkat daerah dan seluruh elemen di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang. Adapun kegiatan pengawasan yang dilakukan Inspektorat daerah pada tahun 2023 dapat dilihat dalam diagram sebagai berikut:



Gambar 4. Proporsi Kegiatan Pengawasan Tahun 2023



Berbagai kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2023 disajikan dalam table berikut:

Tabel 16. Jenis dan Obyek Pemeriksaan Inspektorat Daerah Tahun 2023

No	Jenis Pengawasan	Obyek Pemeriksaan
1	Pemeriksaan Reguler	–
2	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	PDTT atas Pengelolaan Aset Desa Tahun 2022
		PDTT atas Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi di Sekretariat Daerah Tahun 2014
		PDTT atas <i>stock opname</i> dan <i>cash opname</i> pada Bagian Umum Setda Kab. Lumajang Tahun 2023
		PDTT <i>stock opname</i> dan <i>cash opname</i> pada Badan Kepegawaian Daerah Kab. Lumajang Tahun 2023
		PDTT <i>stock opname</i> dan <i>cash opname</i> pada DMPD Kab. Lumajang Tahun 2023
		PDTT atas Pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID 19 pada Dinas Kesehatan PP dan KB Kabupaten Lumajang untuk Periode sampai dengan 28 Februari 2023
		PDTT atas Pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID 19 pada Fasyankes Kabupaten Lumajang untuk Periode sampai dengan 28 Februari 2023
		PDTT atas Pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID 19 pada se-Kabupaten Lumajang untuk Periode sampai dengan 28 Februari 2023
		PDTT atas Kinerja Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Kabupaten Lumajang TA. 2022
		PDTT <i>stock opname</i> dan <i>cash opname</i> pada DPMPTSP Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2022
		PDTT <i>stock opname</i> dan <i>cash opname</i> pada BPRD Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2022
		PDTT <i>stock opname</i> dan <i>cash opname</i> pada BPKD Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2022
		PDTT <i>stock opname</i> dan <i>cash opname</i> pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2022
		PDTT <i>stock opname</i> dan <i>cash opname</i> pada P2KB Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2022
		PDTT <i>stock opname</i> dan <i>cash opname</i> pada Camat Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2022
PDTT Cash Opname dan Stok Opname pada BPKD selaku koordinator Cash opname dan stock opname Perangkat Daerah		
PDTT Cash Opname dan Stok Opname pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang T.A 2023		



No	Jenis Pengawasan	Obyek Pemeriksaan
		PDTT Cash Opname dan Stok Opname pada UPT Puskesmas Gesang T.A 2023
		PDTT Cash Opname dan Stok Opname pada UPT Puskesmas Kunir T.A 2023
		LHP PDTT Cash Opname dan Stok Opname pada BPKD selaku koordinator Cash opname dan stock opname Perangkat Daerah
		LHP PDTT Cash Opname dan Stok Opname pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang T.A 2023
		LHP PDTT Cash Opname dan Stok Opname pada UPT Puskesmas Gesang T.A 2023
		LHP PDTT Cash Opname dan Stok Opname pada UPT Puskesmas Kunir T.A 2023
		LH PDTT / Investigasi atas indikasi Penyalahgunaan Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa kabuaran Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang TA. 2019
		LH PDTT AMJ Desa Tukum Kecamatan Tekung TA. 2023
		LH PDTT AMJ Desa Tempurejo Kecamatan Tempursari TA. 2023
		LH PDTT AMJ Kepala Desa Jatigono Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang Tahun 2023 An, RUDY PRASETYPO
		LH PDTT AMJ Kepala Desa Umbul Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang Tahun 2023
		LH PDTT AMJ Kepala Desa Tempeh Tengah Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang Tahun 2023
		LH PDTT AMJ Kepala Desa Tempeh Lor Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang Tahun 2023
		LH PDTT AMJ Kepala Desa Candipuro Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang Tahun 2023
		LH PDTT AMJ Kepala Desa Penanggal Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang Tahun 2023
		Laporan Hasil PDTT atas permintaan rekom usul penetapan sanksi daftar hitam a.n CV GUNA JAYA
		Laporan Interim I Hasil pemeriksaan DTT probity audit atas pengadaan biosafety level 2 laboratorium kesehatan daerah
		Laporan interm hasil pemeriksaan DTT probity audit atas pengelolaan laboratorium lingkungan hidup kabupaten/kota
		Laporan hasil pemeriksaan DTT pengeloan dan BOS Reguler TA. 2023
		Laporan Interim II Hasil pemeriksaan DTT probity audit atas pengadaan biosafety level 2 laboratorium kesehatan daerah
		Laporan pemeriksaan DTT Pengendalian inflasi daerah kabupaten lumajang tahun 2023



No	Jenis Pengawasan	Obyek Pemeriksaan
3	Reviu	Hasil Reviu atas Laporan Penyerapan dana dan capaian keluaran DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup - tematik penguatan DPP dan SIKM tahap 3 Tahun Anggaran 2022
		Hasil Reviu atas Laporan Penyerapan dana dan capaian keluaran (<i>Output</i>) DAK Fisik Reguler Bidang Air Minum Sub Bidang Air Minum Sub Bidang Air Minum tahap 3 Tahun Anggaran 2022
		Hasil Reviu atas Laporan Penyerapan dana dan capaian keluaran (<i>Output</i>) DAK Fisik Reguler Bidang Sanitasi Sub Bidang Sanitasi tahap 3 Tahun Anggaran 2022
		Hasil Reviu atas Laporan Penyerapan dana dan capaian keluaran (<i>Output</i>) DAK Fisik Reguler Bidang Jalan Sub Bidang Jalan tahap 3 Tahun Anggaran 2022
		Hasil Reviu atas Laporan Penyerapan dana dan capaian keluaran (<i>Output</i>) DAK Fisik Reguler Bidang Jalan Sub Bidang Jalan - Tematik Penguatan DPP dan SIKM tahap 3 Tahun Anggaran 2022
		Hasil Reviu atas Laporan Penyerapan dana dan capaian keluaran (<i>Output</i>) DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian Sub Bidang Pertanian - Tematik Pengembangan Food Estate dan Sentra Produksi Pangan tahap 3 Tahun Anggaran 2022
		Hasil Reviu atas Laporan Penyerapan dana dan capaian keluaran (<i>Output</i>) DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan Sub Bidang SD tahap 3 Tahun Anggaran 2022
		Hasil Reviu atas Laporan Penyerapan dana dan capaian keluaran (<i>Output</i>) DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan Sub Bidang SMP tahap 3 Tahun Anggaran 2022
		Hasil Reviu atas Laporan Penyerapan dana dan capaian keluaran (<i>Output</i>) DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan dan KB Sub Bidang Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi sekaligus - Rekomendasi Tahun Anggaran 2022
		Hasil Reviu atas Laporan Penyerapan dana dan capaian keluaran (<i>Output</i>) DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan dan KB Sub Bidang Penguatan Percepatan Penurunan Stunting sekaligus Tahun Anggaran 2022
		Hasil Reviu atas Laporan Penyerapan dana dan capaian keluaran (<i>Output</i>) DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan dan KB Sub Bidang Kemarfasian sekaligus - Rekomendasi Tahun Anggaran 2022
Hasil Reviu atas Laporan Penyerapan dana dan capaian keluaran (<i>Output</i>) DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan dan KB Sub Bidang Pengendalian Penyakit		



No	Jenis Pengawasan	Obyek Pemeriksaan
		sekaligus - Rekomendasi Tahun Anggaran 2022
		Hasil Reviu atas Laporan Penyerapan dana dan capaian keluaran DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup - tematik penguatan DPP dan SIKM sekaligus - Rekomendasi Tahun Anggaran 2022
		Hasil Reviu atas Laporan Penyerapan dana dan capaian keluaran DAK Fisik Penugasan Bidang Industri Kecil dan Menengah - tematik penguatan DPP dan SIKM sekaligus - Rekomendasi Tahun Anggaran 2022
		Hasil Reviu atas Laporan Penyerapan dana dan capaian keluaran (<i>Output</i>) DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan dan KB Sub Bidang Penguatan Sistem Kesehatan sekaligus - Rekomendasi Tahun Anggaran 2022
		Hasil Reviu atas Laporan Penyerapan dana dan capaian keluaran (<i>Output</i>) DAK Fisik Penugasan Bidang Pariwisata Sub Bidang Tematik Penguatan DPP dan SIKM Tahap III Tahun Anggaran 2022
		Hasil Reviu atas Laporan Penyerapan dana dan capaian keluaran (<i>Output</i>) DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian Sub Bidang Pertanian - Tematik Pengembangan Food Estate dan Sentra Produksi Pangan Sekaligus - Rekomendasi Tahun Anggaran 2022
		Hasil Reviu Laporan Realisasi Penyerapan dana dan capaian <i>Output</i> Kegiatan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022
		LHR LPPD Tahun 2022
		LHR atas LKj sebagai bagian dari LPPD Kabupaten Lumajang Tahun 2022
		LHR Reviu atas Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 - 2026
		LHR Penganggaran DAU earmarking Pendanaan Kelurahan Tahun Anggaran 2023
		LHR usulan pemberian Tunjangan Hari Raya 50% TPG/Tamsil bagi ASN Guru (PNS/PPPK) Tahun 2023
		LHR usulan pemberian Tunjangan Hari Raya 50% TPG/Tamsil bagi ASN Guru (PNS/PPPK) Tahun 2023
		LHR RKPD Tahun 2024
		LHR Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2023
		P2HP LHM atas Penanganan Banjir dan Tanah Longsor Tahun 2023 di Wilayah Kabupaten Lumajang
		LHR KUA PPAS Tahun 2024



No	Jenis Pengawasan	Obyek Pemeriksaan
		LHR atas Pengusulan Penghapusan Piutang Daerah pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang
		LHR Perubahan KUA PPAS RKA SKPD dan RKA SKPKD Tahun Anggaran 2023
		LHR DAU Penyaluran DAU Earmarking Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahap I syarat salur Tahap II TA. 2023
		LHR DAU Penyaluran DAU Earmarking Bidang Pendidikan TA. 2023 pada Dinas Perikanan Tahap I syarat salur Tahap II
		LHR DAU Penyaluran DAU Earmarking Bidang Pendidikan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan TA. 2023 Tahap I syarat salur Tahap II
		LHR DAU Penyaluran DAU Earmarking Bidang Pendidikan pada Dinas Lingkungan Hidup Tahap I syarat salur Tahap II TA. 2023
		LHR DAU Penyaluran DAU Earmarking Pendanaan Pendidikan TA. 2023 Tahap I syarat salur Tahap II
		LHR DAU Penyaluran DAU Earmarking Pendanaan Pendidikan TA. 2023 Tahap I syarat salur Tahap II
		LHR DAU Penyaluran DAU Earmarking Pendanaan Pendidikan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Tahap I syarat salur Tahap II TA. 2023
		LHR DAU Penyaluran DAU Earmarking Pendanaan Pendidikan pada Dinas Pariwisata Tahap I syarat salur Tahap II TA. 2023
		LHR DAU Penyaluran DAU Earmarking Pendanaan Kesehatan pada Dinas Kesehatan P2KB Tahap I syarat salur Tahap II TA. 2023
		LHR DAU Penyaluran DAU Earmarking Pendanaan Kesehatan pada DPKP Tahap I syarat salur Tahap II TA. 2023
		LHR DAU Penyaluran DAU Earmarking Pendanaan Kesehatan pada RTP dan TU Pimpinan Setda Kabupaten Lumajang Tahap I syarat salur Tahap II TA. 2023
		LHR DAU Penyaluran DAU Earmarking Pendanaan Kesehatan TA. 2023 Tahap I syarat salur Tahap II
		LHR DAU Penyaluran DAU Earmarking Pendanaan Kesehatan pada Dinas Lingkungan Hidup Tahap I syarat salur Tahap II TA. 2023
		LHR DAU Penyaluran DAU Earmarking Pendanaan Kesehatan TA. 2023 Tahap I syarat salur Tahap II
		LHR DAU Penyaluran DAU Earmarking Bidang Pekerjaan Umum Tahap I syarat salur Tahap II TA.



No	Jenis Pengawasan	Obyek Pemeriksaan
		2023
		LHR atas Laporan Penyerapan Dana dan Capaian Keluaran (Output) kegiatan DAK Fisik Penugasan Bidang Pariwisata Sub bidang Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas Tahap I TA. 2023
		LHR atas Laporan Penyerapan Dana dan Capaian Keluaran (Output) kegiatan DAK Fisik Penugasan Bidang Air Minum Sub bidang Air Minum Tahap I TA. 2023
		LHR atas Laporan Penyerapan Dana dan Capaian Keluaran (Output) kegiatan DAK Fisik Penugasan Bidang Sanitasi Sub bidang Sanitasi Tahap I TA. 2023
		LHR atas Analisis Standar Biaya (ASB), Standar Biaya dan Standar Satuan Harga Kabupaten Lumajang Tahun 2024
		Laporan Hasil Reviu atas Laporan Penyerapan dana dan capaian (output) kegiatan DAK Fisik bidang Pendidikan sub bidang SD Tahap I TA. 2023
		Laporan Hasil Reviu atas Laporan Penyerapan dana dan capaian (output) kegiatan DAK Fisik bidang Pendidikan sub bidang SMP Tahap I TA. 2023
		Laporan Hasil Reviu atas Laporan Penyerapan dana dan capaian (output) kegiatan DAK Fisik bidang Pendidikan sub bidang SD Tahap I TA. 2023
		Laporan hasil reviu pengadaan PPPK Tahun 2023 tahap perencanaan sampai dengan seleksi administrasi pada pemerintahan kabupaten lumajang
		Laporan Hasil reviu harga perkiraan sendiri (HPS) pembangunan gedung politeknik negeri malang kampus lumajang pada DPUTR Kabupaten Lumajang Tahun 2023
		Laporan Hasil Reviu atas manajemen ASN pada BKD Kabupaten Lumajang Tahun 2023
		Laporan Hasil Reviu tata kelola perizinan dan non perizinan pada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten lumajang Tahun 2023
		Laporan hasil reviu atas laporan penyerapan dan capaian keluaran (output) kegiatan DAK Fisik penugasan bidang pertanian sub bidang pertanian - tematik penguatan kawasan sentra produksi pangan (pertanian, perikanan dan hewan) tahap 2 TA. 2023
		Laporan Hasil Reviu tata kelola barang milik daerah kabupaten lumajang Tahun 2023
		Laporan Hasil Reviu atas pelayanan publik pendidikan kabupaten lumajang Tahun 2023
		Laporan hasil reviu atas laporan penyerapan dan capaian keluaran (output) kegiatan DAK Fisik



No	Jenis Pengawasan	Obyek Pemeriksaan
		penugasan bidang Air minum sub bidang air minum tahap 2 TA. 2023
		Laporan hasil reviu atas laporan penyerapan dan capaian keluaran (output) kegiatan DAK Fisik penugasan bidang Kesehatan dan KB sub bidang penguatan sistem kesehatan tahap 2 TA. 2023
		Laporan hasil reviu atas laporan penyerapan dan capaian keluaran (output) kegiatan DAK Fisik penugasan bidang pariwisata -Tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas tahap 2 TA. 2023
		Laporan hasil reviu atas laporan penyerapan dan capaian keluaran (output) kegiatan DAK Fisik penugasan bidang Sanitasi sub bidang sanitasi tahap 2 TA. 2023
		Laporan hasil reviu bantuan pemerintah daerah (bantuan keuangan, hibah dan bantuan sosial) di kabupaten lumajang Tahun 2023
		Laporan hasil reviu atas laporan penyerapan dan capaian keluaran (output) kegiatan DAK Fisik penugasan bidang Pendidikan sub bidang SD tahap 2 TA. 2023
		Laporan hasil reviu atas laporan penyerapan dan capaian keluaran (output) kegiatan DAK Fisik penugasan bidang Pendidikan sub bidang SMP tahap 2 TA. 2023
		Laporan hasil reviu atas pelayanan publik dana transfer umum kabupaten lumajang Tahun 2023
		Laporan hasil reviu atas pelayanan publik kesehatan kabupaten lumajang tahun 2023
		Laporan Hasil reviu harga perkiraan sendiri (HPS) pekerjaan pembangunan View point bantengan TA. 2023 pada Dinas pariwisata Kabupaten Lumajang
		Laporan hasil reviu tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah kabupaten lumajang Tahun 2023
		Laporan hasil Reviu Pengadaan PPPK Tahun 2023 tahap seleksi kompetensi sampai dengan pengumuman kelulusan pada Pemkab Lumajang
		Laporan hasil Reviu atas tata kelola pajak daerah kabupaten Lumajang Tahun 2023
4.	Monitoring	Monitoring Inflasi Kabupaten Lumajang (Laporan harian pada https://bitly/waspengendalianinflasi)
		LHM atas Penanganan Banjir dan Tanah Longsor Tahun 2023 di Wilayah Kabupaten Lumajang
		Laporan Hasil Monitoring FRC pada Perangkat Daerah DPMD Kabupaten Lumajang
		Laporan Hasil Monitoring FRC pada Perangkat Daerah Kecamatan Summersuko Kabupaten Lumajang
		Laporan Hasil Monitoring FRC pada Puskesmas Labruk Kidul Kecamatan Summersuko Kabupaten



No	Jenis Pengawasan	Obyek Pemeriksaan
		Lumajang
		Laporan Hasil Monitoring FRC pada Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Lumajang
		Laporan Hasil Monitoring FRC pada Desa Klapokarum Kecamatan tekung Kabupaten Lumajang
		Laporan Hasil Monitoring FRC pada Lembaga SDN Klapokarum Kecamatan tekung Kabupaten Lumajang
		Laporan Hasil Monitoring FRC pada Desa Grati Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang
		Laporan Hasil Monitoring FRC pada SDN Grati 01 Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang
		Laporan Hasil PDDT atas permintaan rekom usul penetapan sanksi daftar hitam a.n CV GUNA JAYA
		Laporan Hasil Monitoring pengendalian risiko kecurangan/FRC pada Desa papringan Kecamatan Klakah Bulan Oktober Tahun 2023
		Laporan Hasil Monitoring pengendalian risiko kecurangan/FRC pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bulan Oktober Tahun 2023
		Laporan Hasil Monitoring pengendalian risiko kecurangan/FRC pada UPT Puskesmas Klakah Bulan Oktober Tahun 2023
		Laporan Hasil Monitoring pengendalian risiko kecurangan/FRC pada Kecamatan Klakah Bulan Oktober Tahun 2023
		Laporan Hasil Monitoring pengendalian risiko kecurangan/FRC pada SMP Negeri 1 Kedungjajang Bulan Oktober Tahun 2023
		Laporan Hasil Monitoring pengendalian risiko kecurangan/FRC pada SDN Wonorejo 01 Kecamatan Kedungjajang Bulan Oktober Tahun 2023
		Laporan Hasil Monitoring pengendalian risiko kecurangan/FRC pada SMPN 2 Randuagung Kecamatan Randuagung Bulan Oktober Tahun 2023
		Laporan Hasil Monitoring pengendalian risiko kecurangan/FRC pada SDN 01 Randuagung Kecamatan Randuagung Bulan Oktober Tahun 2023
		Laporan Hasil Monitoring pengendalian risiko kecurangan/FRC pada SMPN 2 Jatiroto Kecamatan Jatiroto Bulan Oktober Tahun 2023
		Laporan Hasil Monitoring pengendalian risiko kecurangan/FRC pada SDN Kaliboto Lor 01 Kecamatan Jatiroto Bulan Oktober Tahun 2023
		Laporan Hasil Monitoring pengendalian risiko kecurangan/FRC pada DPKP Bulan Oktober Tahun 2023
		Laporan Hasil Monitoring pengendalian risiko kecurangan/FRC pada DPUTR Bulan Oktober Tahun 2023



No	Jenis Pengawasan	Obyek Pemeriksaan
		Laporan Hasil Monitoring pengendalian risiko kecurangan/FRC pada UPT Puskesmas Candipuro Bulan Oktober Tahun 2023
5.	Evaluasi	Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang Tahun 2022/2023
		Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Kesehatan PP dan KB Kabupaten Lumajang Tahun 2022/2023
		Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada DPMPTSP Kabupaten Lumajang Tahun 2022/2023
		Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2022/2023
		Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang Tahun 2022/2023
		Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang Tahun 2022/2023
		Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2022/2023
		Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada BKD Kabupaten Lumajang Tahun 2022/2023
		Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada DISKOMINFO Kabupaten Lumajang Tahun 2022/2023
		Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2022/2023
		Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada BAPPEDA Kabupaten Lumajang Tahun 2022/2023
		Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang Tahun 2022/2023
		Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang Tahun 2022/2023
		Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada BPBD Kabupaten Lumajang Tahun 2022/2023
		Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada DPKP Kabupaten Lumajang Tahun 2022/2023
		Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada DPMD Kabupaten Lumajang Tahun 2022/2023
		Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada BPKD Kabupaten Lumajang Tahun 2022/2023



No	Jenis Pengawasan	Obyek Pemeriksaan
		Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2022/2023
		Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang Tahun 2022/2023
		Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang Tahun 2022/2023
		Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada BAKESBANGPOL Kabupaten Lumajang Tahun 2022/2023
		Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang Tahun 2022/2023
		Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang Tahun 2022/2023
		Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang Tahun 2022/2023
		Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Sosial P3A Kabupaten Lumajang Tahun 2022/2023
		Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang Tahun 2022/2023
		Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang Tahun 2022/2023
		Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada DIARPUS Kabupaten Lumajang Tahun 2022/2023
		Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang Tahun 2022/2023
		Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang Tahun 2022/2023
		Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada BPRD Kabupaten Lumajang Tahun 2022/2023
		Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada DPUTR Kabupaten Lumajang Tahun 2022/2023
		Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang Tahun 2022/2023
		Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Tahun 2022/2023
		Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang Tahun 2022/2023



No	Jenis Pengawasan	Obyek Pemeriksaan
		Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang Tahun 2022/2023
		Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang Tahun 2022/2023
		Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada SATPOL PP Kabupaten Lumajang Tahun 2022/2023
		Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dispora Kabupaten Lumajang Tahun 2022/2023
		Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang Tahun 2022/2023
		Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang Tahun 2022/2023
		Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang Tahun 2022/2023
		Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang Tahun 2022/2023
		Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Kecamatan Tempel Kabupaten Lumajang Tahun 2022/2023
		Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang Tahun 2022/2023
		Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang Tahun 2022/2023
		Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang Tahun 2022/2023
		Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang Tahun 2022/2023
		Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang Tahun 2022/2023
		Laporan Hasil Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi Tahun 2023

Dari pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah tersusun LHP dan akan diserahkan kepada obyek pemeriksaan untuk dilakukan tindak lanjut. Tujuan akhirnya adalah meminimalisir risiko yang dapat menghambat tujuan dan sasaran yang hendak dicapai secara memadai. Selama ini obyek pemeriksaan kurang tanggap atas Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat Daerah, untuk itu Inspektorat Daerah:

- 1) Meningkatkan intensitas penagihan tindak lanjut kepada objek untuk meningkatkan efektivitas hasil pengawasan dan memberikan pemahaman bahwa tindak lanjut pada dasarnya adalah untuk kepentingan obyek pemeriksaan itu sendiri;
- 2) *Updating* sistem informasi yang memuat hasil pemeriksaan dan tindak lanjut objek pemeriksaan;
- 3) Melakukan kerjasama dengan aparat penegak hukum atas temuan keuangan yang belum ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan;
- 4) Melakukan percepatan pencapaian tindak lanjut untuk temuan yang bersifat administratif.

b. Pelaksanaan Saber Pungli, *Whistle Blower System* (WBS) dan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)

Saber Pungli adalah kegiatan pengawasan Inspektorat Daerah berkolaborasi dengan APH seperti Kepolisian dan Kejaksaan. Beberapa kegiatan yang dilakukan sepanjang tahun 2023 yaitu Sosialisasi Sampai dengan akhir Tahun 2023 telah dilakukan tiga kali, Operasi Tangkap tangan (OTT) sebanyak lima kali, dimana proses pemeriksaan terhadap kasus tersebut masih berlangsung hingga saat ini. Selain OTT, pelaksanaan kegiatan Saber Pungli pada Triwulan IV meliputi: Rapat Koordinasi Pembahasan Bahan Resume Perdata, Ekspose hasil penanganan OTT SDN Rowo Kangkung I, SMPN I Kedungjajang dan SMPN 2 Kunir, Sosialisasi Saber Pungli bagi petugas puskesmas Pembantu di Kecamatan Senduro dan pengelola SDN dan SMPN di wilayah Kecamatan Senduro, serta Sosialisasi peraturan saber pungli tentang SOP Unit Pemberantasan Pungli di Malang, Rakornas Satgas Saber Pungli secara daring.

Pelaksanaan *Whistle Blower System* (WBS) dan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) selain didukung dengan adanya Peraturan Bupati Lumajang terkait pelaksanaan WBS juga didukung dengan pengembangan website Inspektorat daerah Kabupaten Lumajang dengan alamat www.inspektorat.lumajangkab.go.id. Pengembangan ini berupa *interface website* yang mempermudah masyarakat untuk melaporkan adanya penyalahgunaan wewenang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang. Laporan yang masuk



melalui website maupun secara langsung akan ditindaklanjuti oleh APIP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam rangka menjalankan fungsi *third line*, Inspektorat daerah Kabupaten Lumajang melakukan pembinaan dan pengawasan, termasuk pelaporan gratifikasi, dimana Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang sebagai Unit Pengendalian Gratifikasi di Tingkat Kabupaten berupaya mempermudah akses Penyelenggara Negara dalam melaporkan gratifikasi. Langkah-langkah yang telah ditempuh Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang dalam mensosialisasikan pelaporan gratifikasi dilakukan berbasis website yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat. Selain itu Inspektorat daerah juga melakukan publikasi melalui pendistribusian *X – Banner* kepada setiap Perangkat Daerah, Hal ini ditujukan agar setiap pengguna layanan pada masing masing Perangkat Daerah memiliki kesempatan yang sama untuk melaporkan indikasi gratifikasi. Langkah lain yang dilakukan Inspektorat Daerah dalam mensosialisasikan pelaporan gratifikasi adalah pelaksanaan kegiatan sosialisasi secara tatap muka.

Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) melaporkan hasil gratifikasi kepada Bupati setiap tahunnya. Pada tahun 2023 terdapat 5 (lima) pelaporan adanya gratifikasi, dimana kelima laporan tersebut telah selesai ditindaklanjuti, baik dengan pengembalian ke kas negara bila berbentuk uang dan telah mendapatkan surat Keputusan penyelesaian dari Ketua KPK RI, serta diberikan untuk kepentingan sosial bilamana berupa barang. Namun demikian, empat barang yang dilaporkan kepada UPG tidak dikategorikan KPK sebagai gratifikasi, meski rekomendasi dari KPK tetap harus dibagikan kepada masyarakat.

c. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP

Pemenuhan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK Tahun 2023 didasarkan pada hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK semester I tahun 2023, dimana persentase tindak lanjut entitas Pemerintah Kabupaten Lumajang telah tercapai 93,37% dari rekomendasi LHP BPK mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2023.

Selain upaya penyelesaian hasil temuan BPK, Inspektorat daerah juga melakukan upaya-upaya penyelesaian tindak lanjut terhadap

pemeriksaan mandiri yang dilakukan terhadap perangkat daerah dan perangkat desa. Sampai dengan akhir tahun anggaran 2023, capaian pemenuhan tindak lanjut perangkat daerah mencapai 83,59% sedangkan pemerintah desa mencapai 86,49%. Dari perhitungan ini, dapat diketahui bahwa capaian realisasi terhadap tindak lanjut API sebesar 85,04%.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemenuhan terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK_RI sebesar 93,37 persen lebih besar dibandingkan pemenuhan tindak lanjut hasil rekomendasi hasil pemeriksaan APIP. Rerata capaian rekomendasi hasil temuan yang ditindaklanjuti sebesar 89,20 atau mencapai 99,11% dari target yang ditetapkan, sehingga dapat dipastikan bahwa indikator program “Jumlah Temuan yang ditindaklanjuti” telah berkontribusi positif terhadap pencapaian sasaran strategis.

d. Kerjasama Pengawasan Internal

Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang menyadari sepenuhnya bahwa pelaksanaan pengawasan internal tidak dapat berjalan optimal bilamana tidak berkolaborasi dengan lini pengawasan lainnya. Dengan latar tersebut maka Inspektorat Daerah menginisiasi pembentukan FOKAL, yaitu Forum Koordinasi dan Komukasi Pengawasan Lumajang yang diselenggarakan Aparat Pengawas Intern Pemerintah Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang selaku *third line* dengan para pihak penyelenggara pengawasan lainnya untuk meningkatkan kualitas, efektivitas dan efisiensi pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Adapun penjelasan mengenai kegiatan/aktivitas yang masuk dalam lingkup Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi yaitu:

e. Inspektorat Daerah Service Center (ISC)

Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang selain menjadi pengawas internal pemerintahan juga wajib memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat atas pengaduan, pemberian informasi serta konsultasi dan pendampingan kepada ASN atau perangkat daerah yang masuk melalui pelayanan *Inspektorat Services Center* (ISC). Berikut capaian layanan ISC yang telah dilakukan oleh APIP sesuai standar .

Tabel 17. Perbandingan Layanan ISC Tahun 2022 dan Tahun 2023

No	Jenis layanan	Tahun 2022	Tahun 2023
----	---------------	------------	------------

		Masuk	Selesai	Masuk	Selesai
1	Pengaduan	13	11	21	20
2	Konsultasi dan Pendampingan	25	25	2	2

Sumber : Data Inspektorat Daerah Tahun 2022 dan 2023

Hasil dari layanan konsultasi dan pendampingan umumnya dituangkan dalam bentuk laporan, namun pada beberapa kasus hanya berupa komunikasi lisan yang tidak sampai berwujud laporan, dikarenakan proses konsultasi singkat yang sudah dianggap cukup. Di sisi lain, APIP juga wajib menangani kasus yang dilaporkan ke Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 18. Penanganan Kasus Tahun 2023 dan Periode Sebelumnya

No	Jenis Kasus	Tahun 2022		Tahun 2023	
		Masuk	Selesai	Masuk	Selesai
1	Ijin Perceraian	16	16	14	14
2	TP/TGR	3	3	4	3
3	Pelanggaran Disiplin	16	16	12	12
4	Investigatif	5	5	5	5
5	Dumas	3	3	4	4
Jumlah		43	43	39	38

Sumber : Data Inspektorat Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2023



Gambar 5. Penangan Kasus tahun 2023

Jumlah penanganan kasus tahun 2023 lebih sedikit dibandingkan tahun 2022, namun dengan nominal yang tidak terlalu signifikan. Hal ini terlihat dari menurunnya jumlah perceraian dan kasus pelanggaran disiplin. Penanganan kasus masuk dalam Program Penyelenggaraan Pengawasan, satu dari tiga program yang dilaksanakan Inspektorat Daerah di tahun 2023. Dengan memperhatikan jumlah kasus yang masuk sebanyak 39 kasus dan telah diselesaikan 38 kasus, maka capaian penyelesaian kasus pada tahun 2023 mencapai 97,43 %. Capaian ini



sedikit lebih rendah dari tahun sebelumnya yang mencapai 100%. Penyebab penurunan ini adalah 1 (satu) kasus TP/TGR yang belum tuntas hingga akhir tahun 2023, meskipun yang bersangkutan telah menandatangani SKTJM pelunasan TGR.

f. Penilaian Mandiri Pelaksanaana Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan Zona Integritas

PMPRB menjadi salah satu indikator kegiatan yaitu jumlah perangkat daerah yang dilakukan evaluasi PMPRB. Pelaksanaan evaluasi PMPRB menggunakan kertas kerja evaluasi yang telah ditetapkan sebelumnya dan diterapkan kepada seluruh perangkat daerah, sehingga berpengaruh pada nilai PMPRB tingkat Kabupaten.

Beberapa langkah yang mendesak untuk dilakukan diantaranya penyusunan Road Map PMPRB tahun 2020-2025, penyusunan pedoman/SOP masing-masing unsur dalam PMPRB, Tim PMPRB Kabupaten harus pro aktif dalam menggerakkan perangkat daerah untuk segera melakukan percepatan pemenuhan unsur PMPRB, dan memperbaiki sistem di tingkat Kabupaten. Untuk melakukan percepatan PMPRB, maka Inspektorat Daerah melakukan upaya antara lain :

- 1) Sosialisasi pembangunan zona integritas kepada seluruh perangkat daerah dan unit kerja
- 2) Penunjukan perangkat daerah dan unit kerja yang diusulkan untuk pembangunan zona integritas melalui Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/241/427.12/2021 tentang Perangkat Daerah yang Diusulkan Sebagai Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
- 3) Asistensi, pendampingan dan verifikasi kepada perangkat daerah dan unit kerja dalam pembangunan zona integritas
- 4) Koordinasi dengan Kemen PAN-RB dalam hal penilaian dan evaluasi pembangunan zona integritas di Kabupaten Lumajang.

Memasuki akhir tahun 2023 Kementerian PAN/RB mengenalkan reformasi Birokrasi Tematik. Bila Reformasi Birokrasi lama berkonsep pada pemenuhan daya dukung saja dan hasil survei, sehingga konsep ini belum menyentuh akar persoalan masyarakat. Sedangkan Reformasi Birokrasi Tematik harus mampu menyelesaikan persoalan di sekelilingnya.



Reformasi Birokrasi Tematik berfokus pada 4 (empat) tema yaitu Penghentasan Kemiskinan, Peningkatan Investasi, Digitalisasi Layanan Pemerintah, serta Mendukung Program Presiden (Sumber: <http://sipp.menpan.go.id> tahun 2023). Sampai dengan saat ini, hasil penilaian mandiri masih menunggu proses verifikasi dari Kementerian PAN/RB.



B. REALISASI ANGGARAN

Anggaran adalah salah satu modal input bagi Inspektorat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja utama Bupati. Target kinerja serta anggaran yang tersedia dituangkan dalam perjanjian kinerja yang telah dibuat antara Inspektur Daerah dengan Bupati Lumajang. Berikut adalah realisasi anggaran yang dimandatkan kepada Inspektorat Daerah untuk dikelola secara transparan, efektif dan akuntabel sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Tabel 19. Realisasi Anggaran Inspektorat Daerah Tahun 2023

PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	
A. Program/Kegiatan Teknis			Jumlah (RP)	%
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	455.434.000	445.794.000	97,88
1.a	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	334.320.000	325.301.000	97,30
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	83.231.000	78.393.000	94,19
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	113.841.000	113.712.500	99,89
	Reviu Laporan Kinerja	14.994.000	14.984.000	99,93
	Reviu Laporan Keuangan	24.969.000	24.812.000	99,37
	Pengawasan Desa	19.500.000	19.500.000	100
	Kerjasama Pengawasan Internal	49.867.000	46.070.500	92,39
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	27.918.000	27.829.000	99,68
1.b	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	121.114.000	120.493.000	99,48
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	12.690.000	12.675.000	99,88
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	108.424.000	107.818.000	99,44
2	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	507.545.500	495.175.500	97,56
2.a	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	61.740.000	60.256.000	97,59



	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	43.772.000	42.295.000	96,63
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	17.968.000	17.961.000	99,96
2.b	Pendampingan dan Asistensi	445.805.000	434.919.500	97,55
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	5.860.000	5.860.000	100
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	31,839,000	30.602.000	96,11
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	388,172,000	379.232.500	97,70
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	19.934.000	19.225.000	96,44
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah	5.536.192.257	5.443.313.416,14	98,32
3.a	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.958.000	21.801.000	99,28
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.999.000	5.962.000	99,38
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.999.000	5.880.000	98,02
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.980.000	4.980.000	100
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.980.000	4.979.000	99,98
3.b	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.280.570.000	4.260.001.334	99,51
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.269.106.865	4.211.161.334	98,16
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	40.260.000	40.260.000	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.866.000	2.854.000	99,58
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	2.866.000	2.866.000	100
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.866.000	2.860.000	100
3.c	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	268.700.000	266.890.000	99,33



	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	268.700.000	266.890.000 0	99,33
3.d	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	337.641.037	335.385.326	99,33
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.985.676	4.928.450	98,85
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	83.010.019	82.509.315	99,40
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.980.342	10.975.100	99,95
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	238.665.000	236.972.461	99,29
3.e	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	92.711.751	92.699.488	99,99
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	92.711.751	92.699.488	99,99
3.f	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	341.907.750	313.290.838	91,63
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	900.000	301.000	33,44
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	168.135.750	148.849.606	88,53
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	172.872.000	164.140.232	94,95
3.g	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	248.020.759	245.944.918	99,16
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	154.360.605	153.705.456	99,58
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46.660.000	45.547.500	97,62
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	47.000.000	46.691.962,140	99,34
JUMLAH		6.591.883.008	6.476.982.404,140	98,26

Sumber : Inspektorat Daerah (Data Diolah Tahun 2023)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi anggaran Inspektorat Daerah tahun 2023 mencapai Rp. 6.476.982.404,14 dari yang ditargetkan sebesar Rp. 6.591.883.008 atau mencapai 98,26 % dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini terbilang sangat baik meskipun pada triwulan IV Inspektorat Daerah mendapatkan tambahan anggaran



melalui PAK. Sehingga dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah dalam serapan anggaran telah memadai.

BAB IV. PENUTUP

Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja. Laporan kinerja dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap penyelenggaraan pengawasan pemerintahan pada Tahun 2023.

Dari hasil evaluasi kinerja dapat disimpulkan bahwa tujuan dari Inspektorat Daerah sudah selaras dengan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023. Secara umum Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang telah dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya selaku penyelenggara pengawasan Internal dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Lumajang dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan strategis sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana strategis dan rencana kerja.

Walaupun capaian kinerja Inspektorat Daerah sudah masuk kategori sangat baik namun masih terdapat permasalahan dan hambatan sehingga perlu direncanakan pengambilan langkah strategis dalam mempertahankan dan meningkatkan kinerja Inspektorat Daerah.

Tabel 20. Hambatan/Tantangan dan Langkah Strategis Tahun 2023

No.	Hambatan / Tantangan	Rencana Langkah Strategis
1.	Kuantitas SDM secara umum masih sangat terbatas	<ul style="list-style-type: none">• Mengoptimalkan SDM yang ada dengan jalan meningkatkan kemampuannya dengan diklat-diklat, bimtek, pembinaan, sosialisasi baik formal maupun non formal.• Mengajukan penambahan personil kepada BKD• Melakukan pemeriksaan dengan teknik sampling dengan <i>risk based audit</i>;• Penyelesaian tugas berdasarkan skala prioritas.



No.	Hambatan / Tantangan	Rencana Langkah Strategis
2	Sarana dan prasarana pendukung pengawasan yang perlu ditingkatkan	Pemenuhan secara bertahap dengan memasukkan kebutuhan sarana dan prasarana pengawasan pada RKBMD dan RKA, terutama untuk inovasi <i>remote internal control</i> yang mendukung <i>remote internal audit</i>
3	Adanya temuan pemeriksaan yang berulang dan sulit ditindaklanjuti	Melakukan percepatan tindak lanjut dengan mengundang perangkat daerah secara intensif.
4	Sistem dan Prosedur Pengawasan cukup memadai namun belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem informasi pengawasan	Pengembangan sistem, prosedur, kebijakan serta teknis penyelenggaraan pengawasan dan dikembangkan secara bertahap sesuai ketentuan dan akan ditingkatkan melalui sistem informasi pengawasan terintegrasi.
5	Kualitas implementasi SPIP perangkat daerah Kurang memadai	Pendampingan dan evaluasi SPIP melalui model evaluasi terbaru dari BPKP kepada seluruh OPD, dan didukung dengan peraturan yang terintegrasi dengan Nilai Indeks Pengawasan
6	upaya pembangunan Zona Integritas dan Reformasi Birokrasi di tingkat perangkat daerah maupun pemerintah kabupaten Kurang memadai.	Asistensi dan verifikasi upaya pembangunan zona integritas dan reformasi birokrasi kepada perangkat daerah melalui kolaborasi dengan Tim Reformasi Birokrasi tingkat Kabupaten.
7	Semakin banyaknya kebutuhan pelayanan pengaduan dan konsultasi.	Membangun layanan konsultasi <i>real time online</i> untuk meningkatkan Ketepatan waktu dan kualitas pelayanan publik.
8	Instrumen pencegahan korupsi di tingkat desa belum terbangun secara terintegrasi	Membangun sistem MCP untuk tingkat desa dengan mengadopsi MCP tingkat kabupaten oleh KPK RI

Demikian beberapa hal yang dapat disajikan dalam laporan kinerja ini, saran dan kritik yang membangun akan dijadikan pertimbangan dalam menyusun laporan kinerja selanjutnya sehingga mampu memberikan informasi yang tepat dan akurat sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

INSPEKTUR DAERAH

Ir. MOHAMAD SUNARDI, MM
NIP. 19640701 199003 1 011



LAMPIRAN



Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. Mohamad Sunardi, M.M

Jabatan : Inspektur Daerah Kabupaten Lumajang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. Thoriqul Haq, M.ML

Jabatan : Bupati Lumajang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.



Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 10 Januari 2023

Pihak Kedua,


H. THORIQUL HAQ, M.ML

Pihak Pertama,


Ir. MOHAMAD SUNARDI, M.M
NIP. 19640701 199003 1 011



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya sistem pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan menuju <i>good governance</i> dan meningkatnya efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Perangkat Daerah Dengan Indeks Penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Minimal 3,5	75%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 331.770.000	DAU
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Rp. 287.301.000	DAU
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.416.402.705	DAU
	Total	Rp. 6.035.473.705	

Lumajang, 10 Januari 2023


Bupati Lumajang
H. THORIQUL HAQ, M.M.


Inspektur Daerah
H. MOHAMAD SUNARDI, M.M.
NIP. 19640701 199003 1 011



Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Perubahan



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. Mohamad Sunardi, M.M

Jabatan : Inspektur Daerah Kabupaten Lumajang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Indah Wahyuni, SH., M.Si

Jabatan : Pj. Bupati Lumajang


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 2 Oktober 2023

Pihak Kedua,


INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si

Pihak Pertama,


Ir. MOHAMAD SUNARDI, M.M
NIP. 19640701 199003 1 011



LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya sistem pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan menuju <i>good governance</i> dan meningkatnya efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Perangkat Daerah Dengan Indeks Penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Minimal 3,5	75%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 507.545.000	DAU
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Rp. 455.434.000	DAU
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.628.914.008	DAU
	Total	Rp. 6.591.893.008	

Lumajang, 2 Oktober 2023

Bupati Lumajang


INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si

Inspektur Daerah


Ir. MOHAMAD SUNARDI, M.M
NIP. 19640701 199003 1 011



**Laporan Kinerja
Tahun 2023
Inspektorat Daerah**

Lampiran 3. Matrik Perubahan Renstra Tahun 2018-2023

Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Capaian awal tahun perencanaan	2019		2020		2021		2022		2023		Akhir Periode		Unit Kerja
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang Ditindak Lanjuti	%	62%	62%	N/A	63%	N/A	65%	265,995,000	70.0%	341,459,000	75%	785,000,000	75%	1,392,454,000	Inspektorat Daerah
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah laporan hasil pengawasan umum (general) yang diterbitkan	Laporan	275	275	N/A	115	N/A	147	162,535,000	140	240,376,000	147	505,000,000	434	907,911,000	
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah	Laporan	93	93	N/A	63	N/A	70	36,337,000	70	43,932,000	64	125,000,000	204	205,269,000	
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah	Laporan	14	14	N/A	10	N/A	13	21,776,000	18	71,208,000	18	100,000,000	49	192,984,000	
Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja	Laporan	2	2	N/A	2	N/A	2	7,200,000	2	16,554,000	2	50,000,000	6	73,754,000	
Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan	Laporan	1	1	N/A	1	N/A	1	10,800,000	1	30,015,000	1	50,000,000	3	90,815,000	
Pengawasan Desa	Jumlah laporan hasil pengawasan desa	Laporan	158	158	N/A	10	N/A	32	52,560,000	20	36,065,000	30	100,000,000	82	188,625,000	
Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah kesepakatan pengawasan internal yang terbentuk	Kesepakatan	5	5	N/A	27	N/A	27	33,862,000	27	30,230,000	30	50,000,000	84	114,092,000	
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	Dokumen	2	2	N/A	2	N/A	2	-	2	12,372,000	2	30,000,000	6	42,372,000	



**Laporan Kinerja
Tahun 2023
Inspektorat Daerah**

Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Capaian awal tahun perencanaan	2019		2020		2021		2022		2023		Akhir Periode		Unit Kerja
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu (specific) yang diterbitkan	Laporan	24	24	N/A	29	N/A	30	103,460,000	35	101,083,000	45	280,000,000	110	484,543,000	
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah laporan penyelesaian kerugian Negara/Daerah yang ditangani	Laporan	4	4	N/A	4	N/A	5	1,875,000	5	-	5	30,000,000	15	31,875,000	
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	Laporan	20	20	N/A	25	N/A	25	101,585,000	30	101,083,000	40	250,000,000	95	452,668,000	
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN , PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan lainnya (pembinaan) yang ditindak lanjuti	%	62%	62%	N/A	63%	N/A	65%	159,453,000	70.0%	238,880,000	75%	675,000,000	75%	1,073,333,000	
	Persentase LHP yang sesuai standar	%	85%	85%	N/A	85%	N/A	90%		90%		90%		90%		
	Nilai Kapabilitas APIP	Angka	3	3	N/A	3	N/A	3,25		3,25		3,5		3,5		
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah laporan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang diterbitkan	Laporan	6	6	N/A	6	N/A	10	30,036,000	10	57,052,000	10	300,000,000	30	387,088,000	
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	Rekomendasi	4	4	N/A	5	N/A	10	13,086,000	10	37,627,000	15	150,000,000	35	200,713,000	
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang disusun	Rekomendasi	4	4	N/A	5	N/A	10	16,950,000	10	19,425,000	15	150,000,000	35	186,375,000	
Pendampingan dan Asistensi	Jumlah laporan hasil pendampingan dan asistensi yang diterbitkan	Laporan	132	132	N/A	136	N/A	30	129,417,000	34	181,828,000	34	375,000,000	593	686,245,000	
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan	Perangkat daerah	60	60	N/A	61	N/A	72	1,342,000	72	11,277,000	72	25,000,000	216	37,619,000	



**Laporan Kinerja
Tahun 2023
Inspektorat Daerah**

Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Capaian awal tahun perencanaan	2019		2020		2021		2022		2023		Akhir Periode		Unit Kerja
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	pemerintahan daerah															
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi	Perangkat daerah	52	52	N/A	52	N/A	52	9,150,000	52	31,890,000	52	100,000,000	156	141,040,000	
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring, dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Kegiatan	6	6	N/A	6	N/A	6	105,845,000	10	118,657,000	10	150,000,000	26	374,502,000	
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas	Perangkat daerah	14	14	N/A	17	N/A	83	13,080,000	56	20,004,000	56	100,000,000	195	133,084,000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	%	85%	85%	N/A	83%	N/A	95%	4,612,181,342	95%	4,624,339,660	95%	6,585,100,000	95%	15,821,621,002	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	%	100%	100%	N/A	100%	N/A	100%	5,659,000	100%	5,773,000	100%	32,000,000	100%	43,432,000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	3	3	N/A	3	N/A	3	964,000	2	2,826,000	3	8,000,000	8	11,790,000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	3	3	N/A	3	N/A	3	1,670,000	3	-	3	8,000,000	9	9,670,000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Laporan	5	5	N/A	5	N/A	5	991,000	5	-	5	8,000,000	15	8,991,000	



**Laporan Kinerja
Tahun 2023
Inspektorat Daerah**

Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Capaian awal tahun perencanaan	2019		2020		2021		2022		2023		Akhir Periode		Unit Kerja
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	8	8	N/A	8	N/A	8	2,034,000	8	2,907,000	8	8,000,000	24	12,941,000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	83%	83%	N/A	83%	N/A	100%	3,847,285,655	100%	3,939,137,150	100%	4,763,500,000	100%	12,549,922,805	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	35	35	N/A	34	N/A	33	3,837,816,303	33	3,904,301,150	33	4,400,000,000	33	12,142,117,453	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	12	12	N/A	12	N/A	12	6,546,352	12	34,836,000	12	350,000,000	36	391,382,352	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	6	6	N/A	6	N/A	6	2,072,000	6	-	6	2,500,000	18	4,572,000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	18	18	N/A	18	N/A	18	851,000	18	-	18	8,000,000	54	8,851,000	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	dokumen	1	1	N/A	1	N/A	1	-	1	-	1	3,000,000	3	3,000,000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD	%	100%	100%	N/A	100%	N/A	100%	13,168,000	100%	-	100%	235,000,000	100%	248,168,000	



**Laporan Kinerja
Tahun 2023
Inspektorat Daerah**

Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Capaian awal tahun perencanaan	2019		2020		2021		2022		2023		Akhir Periode		Unit Kerja
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	28	28	N/A	4	N/A	4	13,168,000	28	-	28	200,000,000	28	213,168,000	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	0	N/A	0	N/A	0	-	0	-	40	35,000,000	40	35,000,000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	%	100%	100%	N/A	100%	N/A	100%	298,896,440	100%	284,781,830	100%	368,000,000	100%	951,678,270	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	N/A	1	N/A	1	5,086,400	1	3,106,840	1	5,000,000	1	13,193,240	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	N/A	2	N/A	2	102,509,260	2	85,768,210	2	100,000,000	6	288,277,470	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	N/A	1	N/A	1	10,911,780	1	10,911,780	1	11,000,000	3	32,823,560	
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	1	N/A	1	N/A	2	25,694,000	2	-	2	2,000,000	6	27,694,000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	30	30	N/A	30	N/A	40	154,695,000	40	184,995,000	40	250,000,000	120	589,690,000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi pengadaan BMD	%	100%	100%	N/A	100%	N/A	90%	126,341,338	90%	-	90%	600,000,000	90%	726,341,338	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	2	N/A	2	N/A	6	126,341,338	0	-	4	600,000,000	10	726,341,338	



**Laporan Kinerja
Tahun 2023
Inspektorat Daerah**

Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Capaian awal tahun perencanaan	2019		2020		2021		2022		2023		Akhir Periode		Unit Kerja
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	%	100%	100%	N/A	100%	N/A	100%	212,830,600	100%	210,253,200	100%	235,000,000	100%	658,063,800	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	N/A	12	N/A	12	24,000	12	1,716,000	12	5,000,000	36	6,740,000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	N/A	12	N/A	12	58,081,600	12	55,137,600	12	70,000,000	36	183,219,200	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	N/A	12	N/A	12	154,725,000	12	153,399,600	12	160,000,000	36	468,124,600	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD	%	90%	90%	N/A	90%	N/A	90%	108,000,309	90%	184,434,480	90%	351,600,000	90%	644,034,789	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	27	27	N/A	27	N/A	27	80,495,309	27	146,859,480	27	301,600,000	27	528,954,789	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	36	36	N/A	36	N/A	36	27,505,000	36	37,575,000	36	50,000,000	36	115,080,000	
Jumlah									5,037,629,342		5,204,678,660		8,045,100,000		18,287,408,002	



Laporan Kinerja
Tahun 2023
Inspektorat Daerah

Lampiran 4. Matrik Rencana Kerja Tahun 2023

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6
A	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang Ditindak Lanjuti	75%	934,016,000	DAU
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah laporan hasil pengawasan umum (general) yang diterbitkan	147	655,296,000	
1.1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah	64	164,796,000	
1.2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah	18	210,500,000	
1.3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja	2	50,000,000	
1.4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan	1	50,000,000	
1.5	Pengawasan Desa	Jumlah laporan hasil pengawasan desa	30	100,000,000	
1.6	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah kesepakatan pengawasan internal yang terbentuk	30	50,000,000	
1.7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	2	30,000,000	
2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu (spesifik) yang diterbitkan	45	278,720,000	
2.1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah laporan penyelesaian kerugian Negara/Daerah yang ditangani	5	28,720,000	



Laporan Kinerja
Tahun 2023
Inspektorat Daerah

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6
2.2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	40	250,000,000	
B	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan lainnya (pembinaan) yang ditindak lanjuti 2. Persentase LHP yang sesuai standar 3. Nilai Kapabilitas APIP	1. 75% 2. 90% 3. 3,5	698,472,200	
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah laporan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang diterbitkan	10	295,000,000	
1.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	15	150,000,000	
1.2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang disusun	15	145,000,000	
2	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah laporan hasil pendampingan dan asistensi yang diterbitkan	34	403,472,200	
2.1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah	72	25,000,000	
2.2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	49	100,000,000	



Laporan Kinerja
Tahun 2023
Inspektorat Daerah

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6
2.3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	10	178,472,200	
2.4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	56	100,000,000	
C	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	95%	6,566,594,600	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100%	34,000,000	
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3	8,000,000	
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	3	8,000,000	
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5	8,000,000	
1.4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	8	10,000,000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	4,458,500,000	



Laporan Kinerja
Tahun 2023
Inspektorat Daerah

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	34	4,400,000,000	
2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan Tugas ASN	12	50,000,000	
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	6	2,500,000	
2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	18	3,000,000	
2.5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	1	3,000,000	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD	100%	226,000,000	
3.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	28	200,000,000	
3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	41	26,000,000	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	100%	372,635,000	



Laporan Kinerja
Tahun 2023
Inspektorat Daerah

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1	10,000,000	
4.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2	100,000,000	
4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	1	11,000,000	
4.4	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	2	2,000,000	
4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	40	249,635,000	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi pengadaan BMD	90%	555,200,000	
5.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	4	555,200,000	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100%	438,699,600	
6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12	5,000,000	
6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	280,300,000	



No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6
6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	153,399,600	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD	90%	481,560,000	
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	27	301,600,000	
7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	36	50,000,000	
7.3	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	1	129,960,000	



Laporan Kinerja
Tahun 2023
Inspektorat Daerah

Lampiran 5. Indeks Sistem Pengendalian Internal

No	Nama OPD	Implementasi SAKIP		FRC		Nilai pencapaian Tindaklanjut;		Nilai pemenuhan Reformasi Birokrasi Unit;		Nilai pemenuhan TGR;		Nilai pencapaian penyampaian LHKASN;		Nilai Kepatuhan Pelaporan Gratifikasi;		Nilai Total	Rata-Rata Nilai Tanpa RB
		Predikat	Nilai	Predikat	Nilai	Predikat	Nilai	Predikat	Nilai	Predikat	Nilai	Predikat	Nilai	Predikat	Nilai		
1	Badan Kepegawaian Daerah	BB	4	77,10%	3	74,04%	3	0,00%	0	100,00%	5	100,00%	5	100,00%	5	25	4,17
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	B	3	65,60%	3	94,09%	5	0,00%	0	100,00%	5	100,00%	5	100,00%	5	26	4,33
3	Badan Pajak dan Retribusi Daerah	CC	2	65,60%	3	85,14%	4	0,00%	0	96,55%	5	100,00%	5	100,00%	5	24	4,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	B	3	76,02%	3	87,44%	4	0,00%	0	100,00%	5	100,00%	5	100,00%	5	25	4,17
5	Badan Pengelola Keuangan Daerah	B	3	85,81%	4	76,98%	4	0,00%	0	100,00%	5	100,00%	5	100,00%	5	26	4,33
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	B	3	85,55%	4	90,42%	5	0,00%	0	100,00%	5	100,00%	5	100,00%	5	27	4,50
7	Sekretariat Daerah	B	3	65,32%	3	87,95%	4	0,00%	0	94,70%	5	94,15%	4	82,61%	4	23	3,83
8	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	CC	2	53,16%	2	86,75%	4	0,00%	0	94,12%	5	94,12%	4	88,24%	4	21	3,50
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	B	3	85,33%	4	92,09%	5	0,00%	0	100,00%	5	100,00%	5	100,00%	5	27	4,50
10	Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	BB	4	61,01%	3	75,07%	4	0,00%	0	100,00%	5	97,62%	4	100,00%	5	25	4,17
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	CC	2	64,38%	3	80,33%	4	0,00%	0	100,00%	5	100,00%	5	100,00%	5	24	4,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	B	3	62,94%	3	78,00%	4	0,00%	0	100,00%	5	100,00%	5	100,00%	5	25	4,17
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	B	3	53,76%	2	67,83%	3	0,00%	0	100,00%	5	100,00%	5	100,00%	5	23	3,83
14	Dinas Lingkungan Hidup	B	3	53,28%	2	98,97%	5	0,00%	0	98,74%	5	98,74%	4	98,33%	4	23	3,83
15	Dinas Pariwisata	B	3	64,87%	3	89,45%	4	0,00%	0	100,00%	5	100,00%	5	100,00%	5	25	4,17
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	B	3	76,24%	3	84,98%	4	0,00%	0	100,00%	5	100,00%	5	100,00%	5	25	4,17
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BB	4	89,65%	4	56,27%	2	0,00%	0	100,00%	5	100,00%	5	100,00%	5	25	4,17
18	Dinas Pemuda dan Olahraga	B	3	54,91%	2	89,12%	4	0,00%	0	100,00%	5	100,00%	5	100,00%	5	24	4,00
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	BB	4	75,61%	3	79,48%	4	0,00%	0	100,00%	5	100,00%	5	100,00%	5	26	4,33
20	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	B	3	66,93%	3	46,90%	1	0,00%	0	99,36%	5	100,00%	5	89,17%	4	21	3,50



Laporan Kinerja
Tahun 2023
Inspektorat Daerah

No	Nama OPD	Implementasi SAKIP		FRC		Nilai pencapaian Tindakan lanjut;		Nilai pemenuhan Reformasi Birokrasi Unit;		Nilai pemenuhan TGR;		Nilai pencapaian penyampaian LHKASN;		Nilai Kepatuhan Pelaporan Gratifikasi;		Nilai Total	Rata-Rata Nilai Tanpa RB
		Predikat	Nilai	Predikat	Nilai	Predikat	Nilai	Predikat	Nilai	Predikat	Nilai	Predikat	Nilai	Predikat	Nilai		
21	Dinas Perhubungan	B	3	81,75%	4	98,37%	5	0,00%	0	100,00%	5	100,00%	5	100,00%	5	27	4,50
22	Dinas Perikanan	B	3	56,80%	2	92,09%	5	0,00%	0	100,00%	5	100,00%	5	100,00%	5	25	4,17
23	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	B	3	78,17%	3	83,08%	4	0,00%	0	100,00%	5	100,00%	5	100,00%	5	25	4,17
24	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	B	3	55,10%	2	93,64%	5	0,00%	0	100,00%	5	100,00%	5	100,00%	5	25	4,17
25	Dinas Tenaga Kerja	B	3	61,45%	3	78,11%	4	0,00%	0	100,00%	5	100,00%	5	100,00%	5	25	4,17
26	Kecamatan Candipuro	CC	2	55,06%	2	65,93%	3	0,00%	0	83,33%	4	100,00%	5	100,00%	5	21	3,50
27	Kecamatan Guclalit	CC	2	59,66%	2	95,61%	5	0,00%	0	100,00%	5	100,00%	5	100,00%	5	24	4,00
28	Kecamatan Jatiroto	CC	2	61,79%	3	98,34%	5	0,00%	0	100,00%	5	100,00%	5	100,00%	5	25	4,17
29	Kecamatan Kedungjajang	B	3	59,91%	2	95,20%	5	0,00%	0	91,67%	5	91,67%	4	91,67%	4	23	3,83
30	Kecamatan Klakah	CC	2	62,52%	3	87,40%	4	0,00%	0	100,00%	5	100,00%	5	100,00%	5	24	4,00
31	Kecamatan Kunir	CC	2	58,57%	2	68,42%	3	0,00%	0	100,00%	5	100,00%	5	100,00%	5	22	3,67
32	Kecamatan Lumajang	B	3	75,61%	3	81,77%	4	0,00%	0	100,00%	5	100,00%	5	100,00%	5	25	4,17
33	Kecamatan Padang	CC	2	54,25%	2	91,37%	5	0,00%	0	91,67%	5	91,67%	4	100,00%	5	23	3,83
34	Kecamatan Pasirian	B	3	59,25%	2	98,31%	5	0,00%	0	100,00%	5	100,00%	5	100,00%	5	25	4,17
35	Kecamatan Pasrujambe	B	3	69,84%	3	95,90%	5	0,00%	0	100,00%	5	100,00%	5	100,00%	5	26	4,33
36	Kecamatan Pronojiwo	CC	2	67,53%	3	96,68%	5	0,00%	0	100,00%	5	100,00%	5	100,00%	5	25	4,17
37	Kecamatan Randuagung	CC	2	63,85%	3	63,76%	3	0,00%	0	100,00%	5	100,00%	5	100,00%	5	23	3,83
38	Kecamatan Ranuyoso	CC	2	58,90%	2	91,93%	5	0,00%	0	100,00%	5	100,00%	5	100,00%	5	24	4,00
39	Kecamatan Rowokangkung	CC	2	52,40%	2	67,72%	3	0,00%	0	100,00%	5	100,00%	5	100,00%	5	22	3,67
40	Kecamatan Senduro	CC	2	70,87%	3	77,31%	4	0,00%	0	90,91%	5	90,91%	4	100,00%	5	23	3,83
41	Kecamatan Sukodono	CC	2	55,18%	2	95,04%	5	0,00%	0	92,86%	5	92,86%	4	92,86%	4	22	3,67
42	Kecamatan Summersuko	CC	2	59,06%	2	96,22%	5	0,00%	0	85,71%	4	85,71%	4	0,00%	0	17	2,83
43	Kecamatan Tekung	CC	2	56,02%	2	99,04%	5	0,00%	0	90,91%	5	90,91%	4	90,91%	4	22	3,67
44	Kecamatan Tempoh	CC	2	58,46%	2	78,13%	4	0,00%	0	100,00%	5	100,00%	5	100,00%	5	23	3,83
45	Kecamatan Tempursari	CC	2	54,40%	2	96,15%	5	0,00%	0	100,00%	5	100,00%	5	100,00%	5	24	4,00
46	Kecamatan Yosowilangun	CC	2	82,47%	4	60,00%	2	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	8	1,33
47	Satuan Polisi Pamong Praja	B	3	74,82%	3	91,74%	5	0,00%	0	100,00%	5	100,00%	5	100,00%	5	26	4,33
48	Sekretariat DPRD	B	3	51,34%	2	98,69%	5	0,00%	0	89,47%	4	89,47%	4	100,00%	5	23	3,83
49	Inspektorat Daerah	BB	4	89,83%	4	100,00%	5	0,00%	0	100,00%	5	100,00%	5	100,00%	5	28	4,67



Lampiran 6. Dokumentasi Kegiatan Inspektorat Daerah



a. Kunjungan dan Pembinaan Pj. Bupati Lumajang Indah Wahyuni, S.H., M.Si. di Kantor Inspektorat Daerah



b. Kegiatan Sosialisasi Saberpongli di Ruang Bela Negara Inspektorat Daerah



c. Kegiatan pendampingan dan Konsultasi OPD



- d. Kegiatan Audit investigatif adanya indikasi penyalahgunaan pengelolaan keuangan UPK Kecamatan Jatiroto



- e. Salah satu proses berlangsungnya kegiatan Pemeriksaan Jalan



- f. Kegiatan Pemeriksaan Pokmas Desa Babakan